

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**



RENCANA KERJA TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 ini sebagaimana amanat pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Dokumen Renja ini mengacu pada RKPD Tahun 2023 dan berpedoman pada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023, yang menurut rencana program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah. Dokumen Rencana Kerja ini diharapkan dapat menjadi panduan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat yang memiliki 3 (tiga) urusan wajib yaitu Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik.

Akhirnya, kami berharap semoga Dokumen Rencana Kerja yang disusun ini, dijadikan acuan bagi penyelenggaraan pemerintahan melalui keterbukaan informasi dan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik yang aman dan terintegrasi.

Pontianak, 27 Juli 2022

Plh. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Kalimantan Barat



D. ZAMRONI, S.STP, M.Si

Pembina

NIP. 19800307 199810 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	5
C. Maksud dan Tujuan	9
D. Sistematika Penulisan	9
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
A. Evaluasi Pencapaian Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	11
B. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	17
C. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pelayanan Daerah	17
D. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	18
E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	18
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	19
B. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	21
C. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	22
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
A. Indikator Kinerja	57
B. Kelompok Sasaran	61
C. Kebutuhan Pendanaan Indikatif	66
D. Sumber Dana	66

BAB V	PENUTUP	67
-------	---------------	----

LAMPIRAN I	TABEL PENETAPAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKPD) PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2023	
------------	--	--

LAMPIRAN II	TABEL CASCADING DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROV. KALBAR	
-------------	--	--

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan penyusunan rencana pembangunan yang mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah. Selain itu, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasannya serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat Perencanaan pembangunan juga dimaksudkan untuk menjamin penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Dalam rangka mewujudkan hal-hal tersebut, secara makro perencanaan pembangunan di daerah disusun menurut hierarki yaitu perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan.

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat merupakan OPD yang dibentuk tahun 2017. Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat mengacu pada Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana terdapat pembagian kewenangan yang diserahkan kepada daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat menyelenggarakan 3 urusan pemerintahan yaitu Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Persandian dan Bidang Statistik.

Diperkuat dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mengatur urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dan menjadi kewenangan daerah. Adapun urusan yang diserahkan kepada daerah mengacu pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, membagi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan dibagi menjadi pelayanan dasar dan non pelayanan dasar.

Urusan non pelayanan dasar terdapat 18 urusan yang diantaranya terdapat urusan komunikasi dan informatika, statistik serta persandian, yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat. Selanjutnya diperkuat juga melalui Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 124 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat sebagai acuan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Rencana Kerja Satuan Kinerja Perangkat Daerah sangat terkait dengan dokumen RKPD dan RENSTRA yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena di dalam Rencana Kerja merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, RENSTRA SKPD dan Rencana Kerja. Penyusunan Rencana Kerja ini merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 yang saat ini masih dalam proses revisi dalam rangka menindaklanjuti implementasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Namun Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2021 sudah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Sejalan dengan proses revisi RPJMD, juga sedang dilaksanakan penyusunan Revisi Rencana Strategis yang sebelumnya ditetapkan dalam Peraturan Gubernur

Kalimantan Barat Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023.

Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan langsung oleh perangkat daerah. Berkaitan dengan hal tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat sebagai salah satu perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan tata kerja wajib menyusun Dokumen Renja. Rencana Kerja merupakan sebuah dokumen rencana pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi alat ukur penilaian capaian kinerja perangkat daerah. Rumusan Dokumen Renja mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintah di Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Persandian dan Bidang Statistik memiliki peranan yang sangat penting dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel. Sebagai OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Dinas Komunikasi dan Informatika telah merumuskan tujuan dan sasaran yang kemudian diuraikan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan berdasarkan dokumen RPJMD dan RENSTRA. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat menjalankan peran mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel. Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan tata

kelola pemerintahan yang baik yaitu dengan memberikan layanan informasi, pengembangan teknologi informasi komunikasi, menjamin keamanan informasi dan menyediakan data statistik sektoral yang terintegrasi.

1. KEDUDUKAN

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 124 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

2. TUGAS POKOK

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di Bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

3. FUNGSI

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat mempunyai fungsi :

- a. Perumusan program kerja di Bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian, dan Statistik;
- b. Perumusan kebijakan di Bidang Informasi Publik, Komunikasi Publik, Aplikasi Informatika, serta Persandian dan Statistik;
- c. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Informasi Publik, Komunikasi Publik, Aplikasi Informatika, serta Persandian dan Statistik;
- d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di Bidang Informasi Publik, Komunikasi Publik, Aplikasi Informatika, serta Persandian dan Statistik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. Pengoordinasian dan pembinaan teknis di Bidang Informasi Publik, Komunikasi Publik, Aplikasi Informatika, serta Persandian dan Statistik;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Informasi Publik, Komunikasi Publik, Aplikasi Informatika, serta Persandian dan Statistik;
- g. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di Lingkungan Dinas;
- h. Pelaksanaan administrasi di Lingkungan Dinas; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur di Bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian, dan Statistik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. STRUKTUR/SUSUNAN ORGANISASI

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 124 Tahun 2021 terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Informasi Publik;
- d. Bidang Komunikasi Publik;
- e. Bidang Aplikasi Informatika;
- f. Bidang Persandian dan Statistik;
- g. Unit Pelaksana Teknis; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

B. LANDASAN HUKUM

Landasan penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan

Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan dan Informasi Publik;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Statistik;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran;
17. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia;
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
19. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pemanfaatan Pembiayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT Fund);
23. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif;
24. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Perlindungan Informasi Berklasifikasi Milik Pemerintah;
29. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025;
30. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);
31. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023;
32. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk (Masterplan) Teknologi Informasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015-2019;
33. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023.
34. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 119 Tahun 2019 Tentang Satu Data;

35. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 124 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD

- a. Sebagai langkah untuk menjaga konsistensi arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Gubernur Kalimantan Barat Periode 2018-2023;
- b. Penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023;
- c. Sebagai acuan resmi bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat dalam menentukan dan melaksanakan prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2022 yang akan dibiayai dari APBD Provinsi Kalimantan Barat.

2. TUJUAN

- a. Mewujudkan sinergisitas antara perencanaan, penganggaran program dan kegiatan dalam mendukung Pencapaian Sasaran Pembangunan Daerah;
- b. Mewujudkan efisiensi alokasi anggaran dalam pembangunan daerah;
- c. Partisipasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat dalam perencanaan dan pembangunan.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

- BAB I Pendahuluan
 - A. Latar Belakang
 - B. Landasan Hukum
 - C. Maksud dan Tujuan
 - D. Sistematika Penulisan
- BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
 - A. Evaluasi Pencapaian Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
 - B. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
 - D. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
 - E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- BAB III Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
 - A. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
 - B. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
 - C. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
- BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
 - A. Indikator Kinerja
 - B. Kelompok Sasaran
 - C. Kebutuhan Pendanaan Indikatif
 - D. Sumber Dana
- BAB V. PENUTUP
- LAMPIRAN

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

A. EVALUASI PENCAPAIAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas pembangunan daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 yaitu sebagai berikut :

- a. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik terdiri dari 1 kegiatan dan 9 sub kegiatan;
- b. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika terdiri dari 2 kegiatan dan 12 sub kegiatan;
- c. Program Penyelenggaraan Statistik Sektorial terdiri dari 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan;
- d. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi terdiri dari 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan.

Dalam rangka pencapaian program prioritas, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2022 telah didukung melalui APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 31.996.833.455,- dan mengalami penyempurnaan anggaran berkurangnya sebesar Rp. 1.105.005.700,00 sehingga pagu penyempurnaan menjadi Rp. 30.891.827.755,00

TABEL : 2.1
Realisasi Program dan Kegiatan Sampai Dengan Bulan Juni
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat
Tahun Anggaran 2022

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Belanja	Realisasi Anggaran (Rp.)	%
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	30.891.827.755,00	11.070.995.983,00	35,84
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	30.350.647.355,00	10.895.422.583,00	35,90

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROV. KALBAR

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Belanja	Realisasi Anggaran (Rp.)	%
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	11.142.310.755,00	4.643.493.679,00	41,67
2.16.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	445.038.700,00	201.791.600,00	45,34
2.16.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	105.730.300,00	62.016.000	58,65
2.16.01.1.01.02	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.992.700,00	-	0
2.16.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	17.994.500,00	0	0
2.16.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	17.503.000,00	0	0
2.16.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	18.201.100,00	0	0
2.16.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	38.305.300,00	35.305.300	92,17
2.16.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	227.311.800,00	104.470.300	45,96
2.16.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.031.243.405,00	3.518.180.814,00	43,81
2.16.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.641.731.405,00	3.327.599.614,00	43,55
2.16.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5.000.000,00	2.020.000	40,40
2.16.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	265.620.000,00	124.410.000	46,84
2.16.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	71.697.700,00	33.070.000	46,12
2.16.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	22.464.900,00	20.556.400	91,50
2.16.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	24.729.400,00	10.524.800	42,56
2.16.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	28.777.200,00	6.967.200,00	24,21
2.16.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Daerah SKPD	28.777.200,00	6.967.200,00	24,21

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROV. KALBAR

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Belanja	Realisasi Anggaran (Rp.)	%
2.16.01.05	Administrasi barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	179.327.300,00	27.932.400	15,58
2.16.01.1.05.03	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	103.304.000,00	6.353.200	6,15
2.16.01.1.05.04	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	16.021.700,00	10.129.200	63,22
2.16.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	19.501.600,00	8.700.000	44,61
2.16.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	40.500.000,00	2.750.000	6,79
2.16.01.1.1.06.01	Administrasi Umum Perangkat Daerah	361.265.650,00	107.126.244,00	29,65
2.16.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	22.517.450,00	14.569.725	64,70
2.16.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49.005.100,00	15.615.600	31,87
2.16.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	25.340.400,00	10.260.400	40,49
2.16.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	58.480.000,00	14.100.000	24,11
2.16.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.797.400,00	5.986.800	28,79
2.16.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.400.000,00	1.820.000	28,44
2.16.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	163.055.700,00	37.201.119	22,81
2.16.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	15.669.600,00	7.572.600	48,33
2.16.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah	1.756.203.300,00	608.804.121,00	34,67
2.16.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	612.900,00	0	0
2.16.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	223.000.000,00	79.642.322	35,71
2.16.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.000.000,00	1.500.000	7,14
2.16.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.511.590.400,00	527.661.799	34,91

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROV. KALBAR

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Belanja	Realisasi Anggaran (Rp.)	%
2.16.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	340.455.200,00	172.691.300	50,72
2.16.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	82.840.000,00	22.852.300	27,59
2.16.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	133.615.200,00	26.871.000	20,11
2.16.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	124.000.000,00	122.968.000	99,17
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	3.103.042.300,00	1.704.099.700	54,92
2.16.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	3.103.042.300,00	1.704.099.700	54,92
2.16.02.1.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	67.973.600,00	3.248.000	4,778
2.16.02.1.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	83.437.900,00	46.204.500	55,38
2.16.02.1.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	147.193.800,00	5.877.000	3,99
2.16.02.1.01.06	Pelayanan Informasi Publik	434.993.600,00	69.022.200	15,87
2.16.02.1.01.07	Layanan Hubungan Media	46.861.000,00	33.216.000	70,88
2.16.02.1.01.08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	1.172.575.000,00	825.376.200	70,39
2.16.02.1.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	108.204.400,00	21.155.800	19,55
2.16.02.1.01.11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	1.000.000.000,00	700.000.000	70,00
2.16.02.1.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	41.803.000,00	0	0

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROV. KALBAR

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Belanja	Realisasi Anggaran (Rp.)	%
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	16.105.294.300,00	4.547.829.204	28,24
2.16.03.1.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	8.395.405.900,00	3.376.077.724,00	40,21
2.16.03.1.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provins	132.474.200,00	34.200.000	25,8
2.16.03.1.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	8.262.931.700,00	3.341.877.724	40,44
2.16.03.1.02	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	7.709.888.400,00	1.171.751.480,00	15,20
2.16.03.1.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	70.331.300,00	35.631.300	50,66
2.16.03.1.02.02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	41.266.100,00	22.800.800	55,25
2.16.03.1.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	5.321.855.400,00	97.142.400	1,83
2.16.03.1.02.04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	144.716.400,00	76.134.000	52,61
2.16.03.1.02.06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	60.650.800,00	44.079.500	72,68
2.16.03.1.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	1.020.160.000,00	481.031.200	47,15
2.16.03.1.02.08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	40.834.700,00	36.401.700	89,14
2.16.03.1.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas	850.936.700,00	327.378.780	38,47
2.16.03.1.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	74.464.900,00	16.667.700	22,38
2.16.03.1.02.11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	84.672.100,00	34.484.100	40,73

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROV. KALBAR

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Belanja	Realisasi Anggaran (Rp.)	%
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	343.348.400,00	155.599.400	45,32
2.20.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	343.348.400,00	155.599.400	45,32
2.20.02.1.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan Daerah Provinsi	343.348.400,00	155.599.400,00	45,32
2.20.02.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	184.538.500,00	85.489.500	46,3
2.20.02.1.01.02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	67.160.700,00	35.285.700	52,54
2.20.02.1.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	91.649.200,00	34.824.200	38,00
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	197.832.000,00	19.974.000	23,08
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	197.832.000,00	19.974.000	23,08
2.21.02.1.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	76.909.700,00		
2.21.02.1.01.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi.	9.968.000,00	568.000	5,70
2.21.02.1.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	66.941.700,00	10.541.700	15,75
2.21.02.1.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antara Daerah Provinsi	120.922.300,00	8.864.300	7,33
2.21.02.1.02.01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemrintah Daerah Provinsi	120.922.300,00	8.864.300	7,33

B. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Tingkat pencapaian kinerja sasaran Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 dapat disajikan berdasarkan 5 sasaran pada Tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Sasaran
Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	(%)
1. Terselenggaranya Pembinaan dan pengelolaan keterbukaan informasi publik Pemprov Kalbar	Predikat dan Nilai keterbukaan informasi publik	Informatif / Zona Hijau 90 - 100	Menuju Informatif 85.43	94.92%
Capaian Sasaran Strategis 1				94.92%
2. Mengoptimalkan Tata kelola SPBE Pemerintah Daerah	Nilai SPBE Pemerintah Daerah	2,60 - 3.50	3.26	100%
Capaian Sasaran Strategis 2				100%
3. Meningkatkan jumlah data set statistik sektoral yang terintegrasi	Jumlah Dataset Statistik Yang Terintegrasi	4.000	9.223	100%
Capaian Sasaran Strategis3				100%
4. Meningkatkan kualitas layanan persandian untuk keamanan informasi pemerintah daerah	Persentase Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	36% - 50% (perlu perbaikan)	45,29%	100%
Capaian Sasaran Strategis 4				100%
Capaian Sasaran Strategis Seluruhnya				98.73%

C. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan visi dan misi Gubernur Kalimantan Barat serta Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 berikut dirumuskan isu-isu strategis yang akan ditangani oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat yaitu sebagai berikut :

1. Belum optimalnya Keterbukaan Informasi Publik sehingga perlu dilakukan pembinaan seluruh perangkat daerah agar informatif dalam memberikan layanan informasi penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat;
2. Belum optimalnya teknologi informasi dan komunikasi oleh seluruh perangkat daerah untuk meningkatkan kualitas tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sehingga perlu dilakukan inovasi secara terus menerus;
3. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi keamanan informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan;
4. Belum terintegrasinya seluruh data statistik Kalimantan Barat secara optimal dalam satu portal yang mudah diakses oleh perangkat daerah dan masyarakat.

D. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Dalam Rancangan Awal RKPD Tahun 2023, Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat disusun dengan pagu indikatif sebesar Rp. 28.842.388.335,00 (*Dua Puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah*). Adapun rincian Rancangan awal Rencana Kerja tersebut terlampir dalam Lampiran I.

E. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat setiap tahun melaksanakan Rapat Perencanaan Teknis Tingkat Provinsi / Forum OPD yang melibatkan unsur Perangkat Daerah, DPRD, Bappeda dan masyarakat. Namun kegiatan tersebut tidak dilaksanakan di Tahun 2022 karena adanya rasionalisasi anggaran (*Automatic Adjustment*). Dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika juga tetap mengedepankan masukan dan saran yang didasarkan pada isu-isu strategis yang berkembang di masyarakat.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

A. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Proyek Prioritas Strategis (Major Project) RPJMN 2020-2024

Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) disusun untuk melaksanakan agenda pembangunan (prioritas nasional) RPJMN 2020-2024, agar RPJM lebih konkrit dalam menyelesaikan isu-isu pembangunan, terukur dan manfaatnya langsung dapat dipahami dan dirasakan masyarakat. Proyek-proyek ini merupakan proyek yang memiliki nilai strategis dan daya ungkit tinggi untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan. *Major Project* menjadi acuan penekanan kebijakan dan pendanaan dalam RPJM, RKP dan APBN tahunannya.

Pendanaan Proyek Prioritas Strategis ini dengan mengintegrasikan antar sumber pendanaan melalui Belanja K/L serta sumber-sumber pendanaan lainnya seperti Subsidi, Transfer Ke Daerah, Daerah, Masyarakat, BUMN serta sumber pendanaan lainnya. Selain itu juga diupayakan langkah-langkah mendorong inovasi skema pembiayaan (*innovative financing*) antara lain seperti Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), *Blended Finance*, *Green Finance* serta *Output Based Transfer/Hibah* ke daerah.

Adapun Major Project pada urusan pemerintahan di Bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.1
Daftar Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*)
RPJMN 2020-2024

No.	Major Project	Manfaat Proyek	Pelaksana
1.	Infrastruktur TIK untuk Mendukung Transformasi Digital	<ul style="list-style-type: none">• Berkurangnya kesenjangan digital• Menyediakan layanan internet cepat untuk mendukung digitalisasi sektor ekonomi, sosial, dan pemerintahan	KEMENKOMINFO

No.	Major Project	Manfaat Proyek	Pelaksana
2.	Penguatan NSOC–SOC dan Pembentukan 121 CSIRT	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menurunnya insiden serangan siber; ▪ Meningkatnya integrasi dan sharing data informasi antar <i>stakeholder</i> terkait (baik pemerintah, swasta, dan komunitas siber lainnya). 	BSSN

Transformasi Digital, pengarustamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarustamaan transformasi digital terdiri dari aspek pemantapan ekosistem (*supply*), pemanfaatan (*demand*) dan pengelolaan Big Data.

Peran TIK menjadi semakin besar dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi. Pembangunan infrastruktur TIK perlu ditingkatkan sejalan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat, Selanjutnya untuk mendorong pelayanan dasar dan meningkatkan kegiatan sosial ekonomi, infrastruktur TIK perlu diperluas agar menjangkau seluruh daerah dan seluruh kelompok masyarakat. Peningkatan keandalan dan kecepatan pelayanan informasi memerlukan perluasan jaringan tetap pitalebar (*fixed broadband*) dan jaringan bergerak pitalebar (*mobile broadband*).

Jaringan tetap pitalebar perlu diperluas hingga menjangkau kecamatan sementara akses telekomunikasi dan internet melalui jaringan pitalebar perlu diperluas hingga seluruh desa. Saat ini masih terdapat 7.971 desa belum terlayani akses telekomunikasi dan internet karena tantangan geografis seperti daerah pegunungan dan daerah terpencil. Perluasan jaringan tetap pitalebar dan jaringan bergerak pitalebar akan mempermudah akses masyarakat terhadap layanan pemerintah. Di samping itu, migrasi penyiaran dari sistem analog ke sistem digital juga diperlukan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan spektrum frekuensi dan kualitas

penyiaran khususnya televisi. Digitalisasi penyiaran akan memberikan ruang pemanfaatan spektrum frekuensi untuk kebutuhan penggunaan lain (*digital dividend*).

Selanjutnya terkait Dinamika Ancaman Siber, penguasaan teknologi dan akses terhadap internet yang signifikan berimplikasi pada potensi ancaman siber. Jumlah serangan siber berbentuk *malware* yang sangat tinggi ke Indonesia merupakan cerminan dari dinamika ancaman keamanan nasional yang terus meningkat. Ancaman tersebut semakin serius karena regulasi, infrastruktur, dan SDM.

B. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan visi dan misi, maka tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat yaitu "Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan melalui keterbukaan informasi dan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik yang aman dan terintegrasi". Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan. Sasaran merupakan bagian internal dalam proses perencanaan strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat, yang harus bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur dan dicapai. Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat dirumuskan untuk masing-masing, yaitu :

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja
Tahun 2023

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan melalui keterbukaan	Terselenggaranya Pembinaan dan Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik Pemprov Kalbar	Predikat dan Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Informatif / Zona Hijau 90 -100

informasi dan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik yang aman dan terintegrasi	Terselenggaranya Tata Kelola SPBE Pemerintah Daerah Yang Optimal	Nilai SPBE Pemerintah Daerah	3,50 – 4,20
	Tercapainya Kriteria Tingkat Kematangan Indeks Pembangunan Statistik	Indeks Pembangunan Statistik Sektoral	Terkelola
	Terselenggaranya Layanan Persandian Untuk Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Yang Berkualitas	Persentase Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	100%
	Terlaksananya Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Provinsi	1. Nilai dan Predikat SAKIP OPD	BB (70 - 80)
		2. Nilai dan Predikat RB OPD	BB (70 - 80)

C. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

1. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik

a. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi

1) *Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik*

Pelaksanaan sub kegiatan ini terdiri dari 1 indikator yaitu Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik, dengan target yang ingin dicapai adalah 1 Dokumen.

Monitoring Opini dan Aspirasi Publik merupakan kegiatan yang memantau informasi dan aspirasi publik pada media cetak dan media sosial khususnya. Pelaksanaan kegiatan untuk mengetahui informasi dan isu yang berkembang di masyarakat karena di era digital yang seakan wilayah dunia tanpa batas informasi dapat diterima semua pihak dan informasi yang belum tentu benar tidak semua dapat dibendung. Sehingga orang

pribadi itu sendiri yang perlu menyaring informasi dan menilai informasi benar atau salah.

Saat ini pemantauan informasi dan aspirasi publik masih dilakukan secara manual dari media cetak dan elektronik yakni Tribun Pontiana, Media Kalbar, Suara Pemred, LKBN Antara, Kompas, Kalbar Online, dan Pontianak Post. Sedangkan untuk media sosial yang dipantau adalah Facebook dan Instagram terkait komentar masyarakat melalui Pontianak Informasi dan Pontianak Media. Khusus Kalbar Informasi belum banyak menjadi perhatian masyarakat.

Hasil pengumpulan informasi ini akan dibuat rekomendasi. Pada tahun sebelumnya pembuatan rekomendasi dengan melakukan FGD akan tetapi dengan situasi pandemi hal ini sulit dilakukan. Untuk itu rekomendasi yang dibuat dilakukan dengan cara pembahasan dalam rapat tim.

Terhadap rekomendasi yang dibuat berkenaan isu publik yang memiliki dampak besar kepada masyarakat maka perlu dibahas. Pada tahun 2023 dianggarkan pembahasan isu publik yang akan diisi narasumber dengan melalui media televisi sebagaimana yang pernah dilakukan pada tahun 2020 melalui Acara Bincang Petang. Sebagai ilustrasi bila Penyakit mulut dan kuku menjadikan kegaduhan di masyarakat Kalbar maka perlu diluruskan oleh narasumber dari Dinas Perkebunan dan Peternakan.

Pada Tahun 2023 ini akan dihidupkan kembali pembuatan bulletin yang isinya akan memberikan informasi dengan menitikberatkan penyebarluasan pembangunan di Provinsi Kalbar dan kegiatan kepala daerah maupun perangkat daerah.

2) Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik

Pelaksanaan sub kegiatan ini terdiri dari 1 indikator yaitu Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan

Media Komunikasi Publik, dengan target yang ingin dicapai adalah 1 Dokumen.

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan melalui kerjasama dengan media massa cetak dalam bentuk liputan khusus (*advertorial*) dan *even by order* dengan mengangkat isu aktual sesuai dengan tujuan yang telah digariskan berdasarkan visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Penyebarluasan informasi kepada masyarakat di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat melalui publikasi Kegiatan Pemerintahan secara Periodik guna membangun citra positif pemerintah di masyarakat. Adapun tujuan yang ingin dicapai yaitu meningkatkan kualitas informasi pembangunan kepada masyarakat dalam mengimbangi pemberitaan media yang cenderung melemahkan wibawa pemerintah dan meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan

3) Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik

Pelaksanaan sub kegiatan ini terdiri dari 1 indikator yaitu Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik, dengan target yang ingin dicapai adalah 1 Dokumen.

a) Tersedianya Informasi Publik melalui Media Sosial

Penggunaan dan pemanfaatan media sosial merupakan salah satu cara dalam mempromosikan serta menyebarluaskan program dan kebijakan pemerintah serta berinteraksi dan menyerap aspirasi masyarakat sehingga mencapai saling pengertian untuk kepentingan bersama antara pemerintah dan masyarakat. Penggunaan media sosial diawali dengan pengertian dan pemahaman yang lengkap, pengaturan yang tepat, serta pengelolaan yang baik akan diperoleh manfaat dari penggunaan media sosial di instansi pemerintah.

Kegiatan ini diharapkan dapat menjadikan media sosial sebagai sarana dalam menyalurkan informasi kepada masyarakat terkait program dan kebijakan pemerintah. Maksud penyelenggaraan Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Media Komunikasi Publik yaitu sebagai sarana penyebaran informasi, opini publik, dinamika percakapan dan diskusi, bahkan telah mengubah perilaku dan gaya hidup masyarakat, khususnya di wilayah-wilayah yang telah terjangkau infrastruktur komunikasi dan informatika.

Tujuan pelaksanaan Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Media Komunikasi Publik adalah pemanfaatan teknologi informasi (*e-Government*), strategi komunikasi, manajemen perubahan (*change management*), manajemen pengetahuan (*knowledge management*), dan penataan tata laksana (*business process*).

b) Terselenggaranya Pengelolaan Website <http://kalbarprov.go.id>

Sistem informasi merupakan sebuah sistem yang berisi jaringan SPD (Sistem Pengolahan Data) yang dilengkapi dengan kanal-kanal komunikasi yang digunakan dalam sistem organisasi data, elemen proses dari sistem informasi adalah mengumpulkan data, mengolah data dan menyebarkan informasi. Dalam sistem informasi data, informasi atau pengetahuan mengalir dibawa oleh dokumen atau media komunikasi elektronik seperti telephone atau jaringan komputer. Syarat-syarat terbentuknya sistem informasi berbasis web adalah :

- Tersedianya web server baik statis maupun dinamis;
- Tersedianya software pemrograman web berbasis server jika ingin membuat web; dan
- Tersedianya database.

Dalam upaya membangun jaringan informasi yang lebih luas dan terintegrasi dengan baik di Lingkungan Pemerintah

Provinsi Kalimantan Barat, Bidang Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat yang secara teknis bertanggung jawab terhadap pengelolaan web portal Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan tujuan utama adalah untuk menyediakan berita/informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Layanan yang telah dilakukan selama ini perlu dilakukan peningkatan setiap tahunnya baik dari sisi teknologi web yang diimplementasikan maupun pemutakhiran informasi/berita.

4) Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik

Pelaksanaan sub kegiatan ini terdiri dari 1 indikator yaitu Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik, dengan target yang ingin dicapai adalah 1 Dokumen.

a) Peliputan dan Dokumentasi

Kegiatan Peliputan dan Dokumentasi merupakan kegiatan yang mendukung dalam hal penyampaian informasi kepada masyarakat terkait promosi daerah, pembangunan daerah, serta eksplorasi potensi daerah melalui kegiatan/*event* yang diselenggarakan. Dari hasil peliputan yang disebar luaskan kepada masyarakat, diharapkan dapat berguna untuk menambah informasi bagi masyarakat mengenai upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam hal pembangunan, baik infrastruktur maupun kesejahteraan bagi masyarakat Kalimantan Barat. Termasuk juga lebih mengenalkan kepada dunia, potensi wisata alam dan kekayaan kultural yang dimiliki oleh Kalimantan Barat.

b) Infografis RLPPD (Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah)

Infografis RLPPD (Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) yang selanjutnya disingkat RLPPD

adalah informasi yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran. RLPPD disampaikan oleh kepala daerah untuk masyarakat bersamaan dengan penyampaian LPPD kepada pemerintah pusat. Penyampaian RLPPD dipublikasikan melalui paling sedikit 3 (tiga) media cetak harian dan/atau media online, papan pengumuman yang mudah diakses publik, dan website resmi pemerintah daerah.

Dalam RLPPD memuat:

- Capaian kinerja makro;
 - Ringkasan capaian kinerja urusan pelayanan dasar;
 - Hasil EPPD dan opini atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun sebelumnya;
 - Ringkasan realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran daerah; dan
 - Inovasi daerah.
- c) Pembinaan Keterbukaan Informasi Publik Daerah pada Badan Publik di Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten/Kota (PPID Utama)

Koordinasi dan kerjasama antar instansi pemerintah, termasuk di bidang kehumasan merupakan suatu hal yang tidak bisa dihindarkan. Namun, tidak dapat dipungkiri adanya kendala dalam pelaksanaan kerjasama antar Humas Pemerintah. Berdasarkan hal tersebut, untuk mendukung pelaksanaannya maka setiap badan publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang wajib untuk membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik serta diperlukan adanya koordinasi

terkait pelaksanaannya secara terus-menerus yang dilakukan oleh PPID Utama.

- d) Di tahun 2023 dianggarkan perjalanan dinas pendampingan Komisi Informasi untuk melakukan pembinaan dan monitoring serta evaluasi dalam menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik yang diakomodir di Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas dengan kode rekening 2.16.02.1.01.12.

5) Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media

Pelaksanaan sub kegiatan ini terdiri dari 1 indikator yaitu Jumlah Layanan Hubungan Media, dengan target yang ingin dicapai adalah 3 Layanan.

Maksud penyelenggaraan Literasi adalah untuk mendidik masyarakat agar mampu menggunakan media secara cerdas dan kritis. Seorang yang melek media kemudian menjadi seseorang yang mampu untuk membaca, memahami, mengevaluasi, menyeleksi dan mengkritik isi dari pesan-pesan media. Tujuan pelaksanaan literasi adalah meningkatkan pemahaman akan literasi digital dan meningkatkan penyebaran konten-konten positif oleh masyarakat sipil, pemerintah, dan media.

Terlaksananya literasi peraturan ITE sehingga media dan masyarakat lebih memahami pentingnya Peraturan ITE. Kegiatan Literasi Media menjadi sangat penting dalam rangka menyikapi kondisi media penyiaran yang memiliki kemampuan menembus ruang-ruang pribadi dan keluarga. Daya penetrasi ini juga dapat mempengaruhi perilaku dan membentuk karakter. Sehingga masyarakat perlu memiliki pemahaman yang baik dalam proses mengkonsumsi media penyiaran, terutama televisi. Kemampuan memilih dan memilah tayangan yang

bermanfaat secara bijak dan benar merupakan tujuan utama dari kegiatan Literasi Media.

6) Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik

Pelaksanaan sub kegiatan ini terdiri dari 1 indikator yaitu Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya, dengan target yang ingin dicapai adalah 250 Orang.

- a) Peningkatan kapasitas SDM di bidang Komunikasi Publik sebanyak 250 peserta ASN di lingkungan Pemprov Kalbar. Masih minimnya SDM di kalangan ASN yang handal dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik dan broadcasting dalam rangka mengelola informasi mengenai program-program pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, mengakibatkan informasi mengenai program-program pembangunan tidak tersampaikan atau tersosialisasikan kepada masyarakat dengan maksimal. Hal ini salah satunya disebabkan masih minimnya pengetahuan tentang jurnalistik dan broadcasting ASN yang bertugas di bidang komunikasi dan informasi publik.

Berdasarkan permasalahan tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat berusaha untuk meningkatkan SDM di kalangan ASN bidang komunikasi dan informasi publik melalui Kegiatan Pelatihan Jurnalistik dan Broadcasting bagi ASN dan Media Lokal tersebut. Maksud dari Kegiatan Pelatihan Jurnalistik dan Broadcasting kemampuan ASN dalam hal meliput dan menulis berita dan informasi publik tentang program dan kegiatan Pemerintah Daerah. Tujuan Kegiatan Pelatihan Jurnalistik dan Broadcasting adalah meningkatkan kualitas SDM ASN yang bertugas di bidang Komunikasi dan Informasi Publik.

- b) Rapat Badan Koordinasi Teknis Kehumasan 14 Kota se-Kalbar melalui pelaksanaan 1 kali rapat koordinasi.

Kerjasama humas pemerintah dalam menyebarluaskan kinerja dan capaian merupakan hal yang penting. Masyarakat mendapatkan informasi dari pemerintah secara langsung sehingga akan menimbulkan respon positif. Peran Bakohumas sangat dibutuhkan untuk sinkronisasi penyebaran informasi dan sinergi antar instansi pemerintah dan lembaga dan partisipasi aktif dari seluruh anggota Bakohumas dan dukungan masyarakat merupakan hal yang harus ditingkatkan. Oleh sebab itu, Kegiatan Rapat Koordinasi Badan Koordinasi Teknis Kehumasan Pemkab/Kota se-Kalbar dianggap sebagai wadah untuk menyampaikan informasi atau *public relation* dalam kaitannya dengan strategi kegiatan Pememerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk disampaikan kepada masyarakat luas.

7) Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah

Pelaksanaan sub kegiatan ini terdiri dari 1 indikator yaitu Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah, dengan target yang ingin dicapai adalah 1 Dokumen.

Keberadaan Komisi Informasi adalah salah satu amanat Undang –Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Komisi Informasi merupakan lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik, dan menyelesaikan sengketa informasi. Pada Tahun 2022 Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat mendapatkan dana Hibah dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat.

8) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas

Pelaksanaan sub kegiatan ini terdiri dari 1 indikator yaitu Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan, dengan target yang ingin dicapai adalah 1 Dokumen.

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat memiliki komitmen dan perencanaan komprehensif untuk membangun *e-Government* di Kalimantan Barat melalui “KALBAR GO DIGITAL”, sebagai inovasi Kalimantan Barat menuju Smart Province dan Transformasi Masyarakat Digital. Salah satu upaya untuk mendukung hal tersebut yaitu mendorong terbentuknya Kampung Media.

Kampung Media merupakan program penyebaran informasi berbasis komunitas dan seluruh kegiatannya menggunakan sebuah portal informasi, berita dan jurnalisme. Sebuah media online yang berlandaskan kekuatan jurnalisme warga, yang menampung konten yang dapat diunggah oleh setiap orang yang sudah terdaftar sebagai Warga Kampung Media.

Dalam upaya pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di wilayah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Barat serta meningkatkan kreatifitas KIM, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat menyelenggarakan kegiatan Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat se-Kalimantan Barat terkait Kampung Media demi menuju “KALBAR GO DIGITAL”.

2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

a. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat Dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi

1) Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi

Pelaksanaan sub kegiatan ini terdiri dari 1 indikator yaitu Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan target yang ingin dicapai adalah 1 Dokumen.

Nama domain adalah nama unik yang diberikan untuk mengidentifikasi nama server komputer seperti web server atau email server di jaringan komputer ataupun internet. Sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 5 Tahun 2015 mengenai Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara, pada pasal 4, bahwa setiap instansi termasuk instansi pemerintah daerah wajib menggunakan dan mendaftarkan nama domain sebagai alamat elektronik resmi instansi. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah mendaftarkan nama domain yaitu *kalbarprov.go.id* setiap tahunnya agar domain yang dimiliki tetap aktif.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat menyediakan layanan sub domain yang dibutuhkan instansi lain dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik. Layanan sub domain yang dimaksud berupa layanan website dan aplikasi yang membutuhkan domain *kalbarprov.go.id*, layanan surat elektronik (email) Pemprov Kalbar, layanan *cloud* (berbagi pakai), dan yang lainnya. Setiap tahunnya diharapkan semua permintaan layanan nama domain dan sub domain dapat

tercapai sebesar 100% dimana semua permintaan dari instansi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dapat terpenuhi dan terlayani dengan baik.

2) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Pelaksanaan sub kegiatan ini terdiri dari 1 indikator yaitu Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah, dengan target yang ingin dicapai adalah 1 Unit.

Kegiatan Perluasan Jaringan Intranet Pemprov. Kalbar dilakukan dengan membangun jaringan intranet yang menghubungkan 40 OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, memasang perangkat jaringan pada titik/PC yang belum terhubung, melakukan monitoring jaringan yang telah terpasang secara realtime serta melakukan evaluasi terhadap masalah yang terjadi pada jaringan.

Pemasangan perangkat jaringan, pelaksanaan kegiatan didahului dengan permintaan akses pada computer pengguna (*PC Client*) yang belum terkoneksi dengan jaringan WAN melalui surat permintaan pemasangan jaringan baru. Permintaan tersebut kemudian diproses pada Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi. Setelah itu dilakukan survey lokasi/titik pemasangan untuk menentukan kebutuhan perangkat. Kemudian dilakukan pemasangan dan pengaturan perangkat jaringan oleh Pengelola Sistem dan Jaringan.

Pemasangan & pemeliharaan backbone, melaksanakan pemeliharaan dan evaluasi jaringan backbone. Jika dibutuhkan penggantian alat/revitalisasi perangkat berdasarkan hasil evaluasi dan perkembangan teknologi.

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan sepanjang tahun, dengan melakukan pencatatan terhadap gangguan/kendala di pihak pengguna dan solusi yang dilaksanakan.

Maksud dari kegiatan Pengelolaan Akses Internet adalah guna mengakomodir kebutuhan akses internet di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat khususnya di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, serta untuk memfasilitasi kebutuhan akses internet server Pemprov. Kalbar agar dapat diakses oleh publik. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat bertanggung jawab terhadap pengelolaan akses internet di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Selain itu, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat juga bertanggung jawab terhadap akses server Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang ditempatkan pada ruang Data Center pada Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat, Jl. Adisucipto No. 50 Pontianak. Layanan yang telah dilakukan selama ini perlu dilakukan peningkatan setiap tahunnya baik dari sisi teknologi yang digunakan maupun besaran kapasitas layanan. Peningkatan layanan tersebut salah satunya diperoleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat melalui kegiatan Penyediaan Akses Internet.

b. Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi

1) *Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi*

Pelaksanaan sub kegiatan ini terdiri dari 1 indikator yaitu Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan target yang ingin dicapai adalah 1 Dokumen.

Beberapa layanan SPBE yang dikelola oleh Diskominfo antara lain adalah Pengelolaan Domain dan Subdomain Pemprov. Kalbar, Pengelolaan Email, Pengelolaan Web Hosting,

serta Pengelolaan Data Cloud (*Storage Cloud*) untuk seluruh OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan *e-Government* dalam rangka mendukung Reformasi Birokasi Publik melalui peningkatan efisiensi dan efektifitas layanan berbasis TIK.

2) *Sub Kegiatan Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik*

Pelaksanaan sub kegiatan ini terdiri dari 1 indikator yaitu Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik, dengan target yang ingin dicapai adalah 1 Dokumen.

Tersedianya peraturan pedoman tata kelola SPBE Pemprov Kalbar sebanyak 1 Peraturan Gubernur. Pedoman mengenai Masterplan Teknologi Informasi dan Komunikasi tersebut berisi rencana induk penerapan TIK di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang disesuaikan dengan arah kebijakan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat. Masterplan tersebut adalah berisi rencana secara umum. Untuk selanjutnya, diperlukan peraturan/pedoman turunan yang membahas lebih detail mengenai pengelolaan TIK di OPD Pemprov. Kalbar, diantaranya yang utama adalah pedoman standardisasi struktur data sebagai landasan pembuatan aplikasi yg terintegrasi dan satu data Kalimantan Barat.

Penyusunan Pedoman Tata Kelola SPBE Pemprov. Kalbar dimaksudkan untuk mendukung proses penerapan TIK di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat agar tertib dan optimal. Mengakomodir proses penyusunan pedoman tata kelola SPBE Pemprov. Kalbar sebagai landasan implementasi TIK di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Diharapkan dapat menghasilkan produk hukum yang mengatur mengenai perencanaan dan manajemen TIK untuk diterapkan

pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat agar sesuai dengan arah kebijakan dan pembangunan. Selanjutnya berdampak pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang diimplementasikan pada semua lini dan aspek pemerintahan berbasis e-government.

3) Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah

Pelaksanaan sub kegiatan ini terdiri dari 1 indikator yaitu Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang dikelola, dengan target yang ingin dicapai adalah 2 Unit.

Jumlah server yang dikelola di Pusat Data Pemprov Kalbar yaitu 18 unit server. Pusat Data / *Data Center* adalah sebuah fasilitas yang dimanfaatkan untuk menempatkan sistem dan komponen-komponen server, seperti sistem telekomunikasi dan penyimpanan data. *Data Center* juga berfungsi sebagai *principal repositories* untuk segala macam peralatan IT, termasuk server, subsistem penyimpanan, *networking switches*, *router* dan *firewall*, serta pemasangan kabel dan physical racks yang digunakan untuk mengatur dan menghubungkan peralatan IT. *Data Center* merupakan pusat penyimpanan dan pemrosesan data secara fisik dimana aplikasi menjalankan proses untuk dapat diakses oleh pengguna/users. Guna menjamin kelancaran akses pada aplikasi yang dijalankan atau data yang disimpan, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah ketersediaan sumber daya listrik yang tidak terganggu, keamanan ruang penyimpanan server, kecepatan pemrosesan dan penyimpanan data, akses internet yang memadai dan tanpa gangguan.

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat bertanggung jawab terhadap pengelolaan *data center* sebagai pusat penyimpanan dan pengolahan data-data di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. *Data Center* yang ada saat ini digunakan untuk media penyimpanan server,

manajemen dan pengelolaan, hingga penyebaran data dan informasi. Saat ini, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat mengelola 16 unit server dan 11 *server collocation* (server dari OPD lain yang dititipkan/menggunakan akses pada ruang server Pemprov. Kalbar). Server-server ini digunakan untuk mendukung layanan SPBE Pemprov. Kalbar diantaranya adalah layanan subdomain, *hosting web* dan aplikasi, data cloud/*cloud storage* pemprov, email serta layanan video conference dan melayani aplikasi dan web dari seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Layanan-layanan tersebut membutuhkan tempat penyimpanan data yang aman, handal dan minim gangguan.

4) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah

Pelaksanaan sub kegiatan ini terdiri dari 1 indikator yaitu Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah, dengan target yang ingin dicapai adalah 1 Dokumen.

Dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, *virtual meeting* semakin banyak digunakan untuk mempertemukan orang-orang di berbagai lokasi sehingga dapat bertemu secara virtual dan melakukan kegiatan. *Virtual meeting* telah menjadi media yang semakin populer dan dapat diterima untuk mengembangkan dan menjangkau audiens yang lebih besar, pemerintah daerah khususnya Provinsi Kalimantan Barat telah menyadari bahwa mengadakan konferensi secara virtual jauh lebih murah daripada acara tatap muka.

Virtual meeting memungkinkan peserta dari jarak jauh untuk mengakses pertemuan dan acara langsung dari tempat masing-masing menggunakan computer atau perangkat lainnya, dapat diselenggarakan sepenuhnya melalui internet atau jaringan telpon dimana peserta tidak perlu berkumpul di ruangan

fisik yang sama. Selain acara langsung, virtual meeting mencakup forum diskusi, pusat sumber konferensi, kemampuan untuk mencari dan mengobrol dengan peserta konferensi lainnya dan fitur lainnya. Semua ini dirancang khusus untuk memberikan kesempatan yang sama kepada peserta virtual untuk mendapatkan pengalaman rapat yang sama dengan peserta ditempat.

Dengan banyaknya *virtual meeting* yang telah diselenggarakan dengan baik dan sukses, membuat banyak pihak khususnya Diskominfo Provinsi Kalimantan Barat percaya bahwa format ini akan terus dilakukan. Di masa mendatang meskipun pandemi telah berlalu, konsep *virtual meeting* akan tetap menjadi pilihan, karena mampu menghadirkan peserta dengan geografis yang lebih luas serta dengan biaya yang jauh lebih murah.

5) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik

Pelaksanaan sub kegiatan ini terdiri dari 1 indikator yaitu Jumlah Data Sarana dan Prasarana Komunikasi dan Informatika pada wilayah 3T dan Kab/Kota se-Kalimantan Barat yang diinventarisir, dengan target yang ingin dicapai adalah 14 Data Kabupaten.

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) mempunyai program untuk pembangunan akses telekomunikasi pada daerah 3T. Setiap tahunnya, diperlukan data mengenai infrastruktur telekomunikasi di daerah 3T yang mencakup usulan daerah yang akan dibutuhkan pembangunan akses telekomunikasi serta kondisi infrastruktur eksisting. Daftar lokasi pembangunan diusulkan oleh masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota, yang kemudian akan ditindaklanjuti dengan memperkuat usulan ke

Kementerian/Lembaga terkait. Data eksisting berupa kondisi keberadaan tower telekomunikasi serta status berfungsi atau tidaknya sarana dimaksud dengan menyertakan kendala serta permasalahan yang terjadi di lapangan.

Kegiatan Identifikasi sarana dan Prasarana Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat bertujuan untuk memperoleh data dan informasi mengenai perkembangan pemerataan pembangunan di bidang telekomunikasi yang di arahkan pada Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi yakni 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal), daerah perbatasan, daerah rintisan dan daerah yang tidak layak secara ekonomis serta wilayah yang belum terjangkau akses dan layanan telekomunikasi.

Adapun tujuan yang ingin dicapai yaitu untuk mendapatkan gambaran perkembangan pembangunan infrastruktur KPU USO di Kalimantan Barat. Mengatasi kesenjangan digital sehingga masyarakat daerah tertinggal, terpencil dan terluar dapat menikmati akses komunikasi dan telekomunikasi dengan mudah dan pemerataan pembangunan telekomunikasi di wilayah Kalimantan Barat.

6) Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pelaksanaan sub kegiatan ini terdiri dari 1 indikator yaitu Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dikembangkan, dengan target yang ingin dicapai adalah 10 Unit.

Jumlah Aplikasi yang dibangun/dikembangkan adalah 10 aplikasi yaitu Aplikasi dan Sosialisasi Gencil, Aplikasi Dashboard Karhutla, Aplikasi Manajemen Pengetahuan SPBE, Aplikasi Mobile Presensi, Pengembangan Aplikasi E-Activity, Pengembangan Aplikasi Kapuas, Pengembangan Dashboard

Desa, Portal Aplikasi Kalbar dan Web Galeri SOP Provinsi Kalbar.

Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi dimaksudkan untuk mendukung pengembangan aplikasi perkantoran atau pelayanan publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Tujuan dilaksanakannya kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi adalah untuk mengakomodir pembuatan aplikasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan memperbarui/mengembangkan portal web resmi/aplikasi berbasis web online Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Kegiatan ini dilakukan dengan melakukan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang meliputi proses analisis kebutuhan, perancangan sistem dan *database*, serta pengkodean dan ujicoba aplikasi. Aplikasi yang akan dibangun dan dikembangkan antara lain dapat berupa portal web Pemprov, web OPD atau aplikasi pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Adapun pelaksanaan pembuatan aplikasi tersebut adalah menggunakan jasa penyedia dengan metode pengadaan langsung. Jumlah video yang dibuat yaitu video promosi qriya dan video workshop data.

Pembuatan video dimaksudkan untuk mendukung dan mempermudah dalam memberikan informasi kepada masyarakat Pemerintah Provinsi Kalimantan barat. Pembuatan video ini bertujuan sebagai media perkenalan yang berupa memberi informasi kepada *audience* tentang bisnis/kegiatan/data yang sedang berjalan, serta tutorial yang audience harus lakukan untuk memperoleh produk/layanan dan fungsi lainnya. Pembuatan video dimaksud untuk mempermudah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam menunjukkan kualitas produk atau layanan jasa yang diberikan, memperluas jangkauan dalamnya hanya menampilkan dan menyebarkan

video yang dimiliki ke berbagai macam platform yang dimiliki Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

7) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

Pelaksanaan sub kegiatan ini terdiri dari 1 indikator yaitu Jumlah Layanan Publik Yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah, dengan target yang ingin dicapai adalah 1 Layanan.

Pengelolaan sistem penghubung layanan elektronik pemerintah 1 sistem penghubung. Integrasi Sistem Informasi dimaksudkan untuk mendukung proses integrasi sistem informasi dalam rangka efisiensi proses bisnis dan meminimalisir duplikasi dan inkonsistensi data. Tujuan dilaksanakannya kegiatan Integrasi Sistem Informasi adalah sebagai berikut :

- a) Untuk mengakomodir proses pengintegrasian sistem informasi yang melibatkan berbagai pihak dari OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
- b) Untuk mempersingkat alur birokrasi dan proses bisnis terutama dalam hal pelayanan publik dan administrasi perkantoran dengan sistem berbagi pakai data/informasi.

Sebagai tindak lanjut dari Komitmen Bersama Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi antara Pemprov Kalbar dan KPK tanggal 8 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh Bapak Pj. Gubernur, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Bupati & Walikota serta ketua DPRD Kab/Kota Se-Kalbar. Pimpinan Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota berkomitmen untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN melalui program pemberantasan korupsi terintegrasi, melaksanakan Rencana Aksi dalam program pemberantasan korupsi terintegrasi secara konsisten dan berkelanjutan.

8) Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas

Pelaksanaan sub kegiatan ini terdiri dari 1 indikator yaitu Jumlah Dokumen program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City, dengan target yang ingin dicapai adalah 1 Dokumen.

Command center merupakan salah satu fasilitas dengan infrastruktur lengkap yang disiapkan untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang berada disebuah lokasi yang lengkap dengan infrastruktur yang diperlukan, dimana seorang gubernur selaku Kepala Daerah bersama-sama tim melakukan meeting, membahas pengambilan keputusan, menugaskan, mengkoordinasi, memonitor dan mengontrol seluruh Tindakan yang diperlukan sebagai respon terhadap krisis yang dihadapi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat antara lain: tindakan tanggap darurat, action plan untuk perbaikan dan pemulihan, langkah pengadaan dan langkah penyediaan informasi publik.

Tujuan dari *command center* adalah mengumpulkan dan memproses informasi yang dibutuhkan agar dapat manage atau mengatur berbagai kejadian dan kesadaran situasional secara cepat dan efektif serta dokumentasi yang bertujuan sebagai amunisi payung hukum dan cost-recovery. Berbagai dokumentasi mengenai informasi yang diterima dan responnya digunakan sebagai :

- a) Perencanaan;
- b) Aksi tanggap;
- c) Penggunaan sumberdaya;
- d) Timeline aktivitas;
- e) Catatan pembiayaan operasional;
- f) Penugasan staf penanganan peristiwa/kejadian; dan
- g) Catatan detail peristiwa/kejadian.

9) Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah

Pelaksanaan sub kegiatan ini terdiri dari 1 indikator yaitu Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah, dengan target yang ingin dicapai adalah 1 Dokumen.

Guna mengukur tingkat kemajuan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat perlu menyelenggarakan Workshop dan Sosialisasi terkait implementasi SPBE di Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang targetnya adalah terselenggaranya kegiatan pemerintah yang terbuka, partisipatif, inovatif, kolaboratif dan dapat diukur dengan jelas.

Kegiatan workshop dan sosialisasi ini untuk meningkatkan pemahaman dan terus belajar serta terlibat secara aktif dalam mengimplementasikan SPBE dalam kegiatan pemerintahan, karena ini merupakan potret pemerintahan seberapa jauh kinerja pemerintah, dari workshop dan sosialisasi ini diharapkan dapat mengukur seberapa jauh implementasi SPBE serta kekuatannya sehingga pemerintah provinsi Kalimantan barat juga dapat mengambil Langkah strategis untuk memperbaikinya.

10) Sub Kegiatan Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)

Pelaksanaan sub kegiatan ini terdiri dari 1 indikator yaitu Jumlah Dokumen Pengelolaan *Government Chief Information Officer (GCIO)*, dengan target yang ingin dicapai adalah 1 Dokumen.

Kegiatan Inventarisasi Sistem Informasi dimaksudkan untuk mendapatkan informasi menyeluruh tentang sejauh mana

penerapan SPBE di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk kemudian dapat dijadikan dasar pengembangan TIK di masa yang akan datang. Tujuan dilaksanakannya kegiatan Inventarisasi Sistem Informasi adalah agar didapatkan informasi yang utuh dan menyeluruh tentang pemanfaatan teknologi informasi di OPD agar identifikasi dapat dilaksanakan langsung di lapangan berdasarkan data sekunder yang didapatkan dari OPD.

Beberapa pengujian teknis perlu dilakukan di lapangan untuk memvalidasi kualitas layanan TIK yang terdapat di setiap OPD, terutama yang berlokasi di dalam kota. Kegiatan ini diharapkan dapat mengakomodir kebutuhan untuk melakukan inventarisasi aplikasi, infrastruktur dan tata kelola TIK secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, sehingga kemudian dapat meningkatkan performa ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi setiap OPD. Kegiatan tersebut akan berdampak pada peningkatan kualitas layanan *e-Government* di Kalimantan Barat sekaligus mendukung Reformasi Birokasi Publik melalui peningkatan efisiensi dan efektifitas layanan berbasis TIK.

3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

a. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi

1) *Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral*

Pelaksanaan sub kegiatan ini terdiri dari 1 indikator yaitu Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral, dengan target yang ingin dicapai adalah 1 Dokumen.

Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis Dan Diseminasi Data Statistik Sektoral

merupakan sub kegiatan gabungan dari mulai koordinasi, pengumpulan, pengelolaan sampai mendiseminasikan data/informasi baik kedalam Portal Satu Data maupun Media Publikasi lainnya. Dengan tujuan untuk berkoordinasi baik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka mensinkronisasikan persepsi statistik sektoral baik pengumpulan dan pengelolaan sesuai Pepres No. 39 Tahun 2019.

a) Kegiatan Pengumpulan Data Statistik Sektoral

Kegiatan Pengumpulan Data Statistik Sektoral bertujuan untuk mengetahui pengumpulan data dari OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota, dalam hal menginput dataset ke dalam Portal Satu Data Kalbar.

b) Kegiatan Analisis Data Statistik Sektoral

Kegiatan Analisis Data Statistik Sektoral bertujuan untuk mengetahui hasil analisis data sektoral yang terhimpun di Portal Satu Data Kalbar untuk dibuat grafik dan infografis, yang pada akhirnya didiseminasikan sebagai bahan informasi.

c) Kegiatan Evaluasi Data Statistik Sektoral

Kegiatan Evaluasi Data Statistik Sektoral bertujuan mengevaluasi dari kinerja OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota dalam hal menyampaikan data-data yang diproduksi dari OPD dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota.

d) Cetak Buku Kalimantan Barat Dalam Angka

Pencetakan Buku Kalimantan Barat Dalam Angka 2023 merupakan kelanjutan dari publikasi sebelumnya yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Barat. Publikasi ini memuat data/informasi statistik tentang

hasil-hasil pembangunan di wilayah Kalimantan Barat selama tahun 2022.

Data yang disajikan dalam publikasi terdiri dari data sekunder yang bersumber dari berbagai instansi/dinas/lembaga pemerintah, dan data primer hasil sensus/survei yang dilakukan Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat.

e) Penyusunan Buku Statistik Sektor Kalimantan Barat

Penyusunan Buku Statistik Sektor Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat 2023, merupakan pelaksanaan amanah UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yaitu dalam rangka pelaksanaan urusan wajib pemerintah daerah non pelayanan dasar di bidang Statistik Sektor.

Buku ini menyajikan ringkasan metadata statistik sektoral yang dikumpulkan pada Tahun 2022 - 2023 yang diharapkan dapat menjadi acuan dan referensi bagi perangkat daerah, perguruan tinggi, dunia usaha dan masyarakat lainnya baik sebagai penyelenggara maupun pemakai data statistik.

Untuk hal tersebut di atas Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat sebagai Walidata bekerja sama dengan praktisi ahli di bidang statistik menyusun Buku Statistik Sektor Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat 2023 yang menyajikan ringkasan metadata statistik sektoral, yang diharapkan dapat menjembatani terbatasnya ketersediaan metadata yang terstandar serta dapat menjadi acuan bagi para penyelenggara statistik sektoral dan masyarakat pengguna lainnya, antara lain dalam hal :

- Penyelenggaraan kegiatan statistik sehingga dapat dihindari terjadinya duplikasi kegiatan yang akan dilaksanakan;
- Sebagai bahan rujukan dalam integrasi dan dokumentasi data dan informasi statistik sektoral;

- Identifikasi kegiatan statistik yang diperlukan, untuk kemudahan penulisan, perolehan, analisis maupun evaluasi data.

2) Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral

Pelaksanaan sub kegiatan ini terdiri dari 1 indikator yaitu Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang dihimpun, dengan target yang ingin dicapai adalah 1 Dokumen.

Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral merupakan pelaksanaan amanah Perpres Nomor 39 Tahun 2019, dimana data-data disampaikan/diproduksi oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk disusun standar data, jenis data dan metadatanya. Dengan tujuan untuk menyusun informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data dan menjelaskan tentang data.

- a) Kegiatan Menghimpun Jumlah Metadata Statistik Sektoral
Kegiatan Menghimpun Jumlah Metadata Statistik Sektoral merupakan kegiatan dalam rangka penyusunan Buku Metadata Statistik Sektoral, karena setiap data harus mempunyai metadata. Dalam kegiatan ini, seluruh OPD di Lingkungan Pemprov Kalbar akan membuat metadata yang nantinya akan dihimpun dan disusun menjadi Buku Metadata Statistik Sektoral.
- b) Penyusunan Buku Metadata Statistik Sektoral
Penyusunan Buku Metadata Statistik Sektoral 2023, merupakan pelaksanaan amanah UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yaitu dalam rangka pelaksanaan urusan wajib pemerintah daerah non pelayanan dasar di bidang Statistik Sektoral.
Buku ini menyajikan ringkasan metadata statistik sektoral yang dikumpulkan pada Tahun 2022 - 2023 yang diharapkan dapat menjadi acuan dan referensi bagi perangkat daerah,

perguruan tinggi, dunia usaha dan masyarakat lainnya baik sebagai penyelenggara maupun pemakai data statistik.

Untuk hal tersebut di atas Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat sebagai Walidata bekerja sama dengan praktisi ahli di bidang statistik menyusun Buku Metadata Statistik Sektoral 2023 yang menyajikan ringkasan metadata statistik sektoral, yang diharapkan dapat menjembatani terbatasnya ketersediaan metadata yang terstandar serta dapat menjadi acuan bagi para penyelenggara statistik sektoral dan masyarakat pengguna lainnya, antara lain dalam hal :

- Penyelenggaraan kegiatan statistik sehingga dapat dihindari terjadinya duplikasi kegiatan yang akan dilaksanakan;
- Sebagai bahan rujukan dalam integrasi dan dokumentasi data dan informasi statistik sektoral;
- Identifikasi kegiatan statistik yang diperlukan, untuk kemudahan penelusuran, perolehan, analisis maupun evaluasi data.

3) *Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral*

Pelaksanaan sub kegiatan ini terdiri dari 1 indikator yaitu Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS, dengan target yang ingin dicapai adalah 104 Orang.

Peningkatan kompetensi dan kinerja dalam pelayanan prima, penyediaan data dan informasi pembangunan serta informasi publik lainnya, merupakan suatu tantangan sekaligus peluang bagi kita sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat untuk dapat menguasai, mengendalikan dan menggunakan teknologi secara cerdas.

Sebagai dinas pelaksana teknis yang memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di Bidang Persandian dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat, berkomitmen untuk melaksanakan tugas dan fungsi secara optimal dalam penyelenggaraan Statistik.

Statistik Sektoral adalah Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas – tugas pemerintah dan tugas pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi pemerintah yang bersangkutan. Statistik Sektoral diselenggarakan oleh instansi pemerintah sesuai tugas pokok dan fungsinya, secara mandiri atau Bersama – sama dengan Badan Pusat Statistik, dalam menyelenggarakan Statistik Sektoral, instansi pemerintah memperoleh data melalui survei, kompilasi produk administrasi, dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun cakupan statistik sektoral adalah semua instansi pemerintah, baik kementerian maupun Lembaga pemerintah non kementerian yang berhubungan dengan komunikasi dan informatika yang bersumber dari dana APBN maupun APBD termasuk kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral.

Tujuan dari kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral ini adalah :

- a) Statistik adalah Data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengelolaan, penyajian dan analisis sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antara unsur dan penyelenggaraan statistik.
- b) Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu (Pemerintah Daerah) dalam

rangka penyelenggaraan tugas – tugas Pemerintah dan pembangunan yang merupakan tugas pokok Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

- c) Memberikan pemahaman kepada Sumber Daya Manusia (SDM) yang berada di semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka menyamakan persepsi terkait penyelenggaraan Statistik Sektoral yang ada di daerah.
- d) Meningkatkan kualitas dan kuantitas Data Statistik Sektoral yang dihasilkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai Produsen Data di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Dasar dari pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral Provinsi Kalimantan Barat adalah :

- a) Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia;
- b) Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah;
- c) Peraturan Gubernur Kalimantan Barat No. 119 Tahun 2019 Tentang Satu Data.

4. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

a. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi

1) *Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi*

Pelaksanaan sub kegiatan ini terdiri dari 1 indikator yaitu Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang ditetapkan, dengan target yang ingin dicapai adalah 1 Dokumen.

Dalam penyelenggaraan urusan Persandian dan Keamanan Informasi diperlukan adanya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah. Dengan ini direncanakan 3 (tiga) Produk Hukum Daerah di Bidang Persandian, yaitu Keputusan Gubernur tentang Pola Jaring Komunikasi Sandi, Standar Operasional Prosedur dan Petunjuk Teknis/Pedoman Penyelenggaraan Persandian pada Pengamanan Informatika, sebagai payung hukum penyelenggaraan urusan Persandian dan Keamanan Informasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar.

2) *Sub Kegiatan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi*

Pelaksanaan sub kegiatan ini terdiri dari 1 indikator yaitu Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi, dengan target yang ingin dicapai adalah 1 Laporan.

Pada prinsipnya, Sumber Daya Keamanan Informasi meliputi 3 (tiga) aspek, yaitu :

a) Sumber Daya Manusia

Analisis terhadap sumber daya manusia, terkait kesesuaian tuntutan kebutuhan tupoksi dengan skill dan pengalaman yang dimiliki, *basic* pendidikan, motivasi, dan kemampuan berkomunikasi, serta kinerja kerja, terkait urusan Persandian untuk Pengamanan Informatika.

b) Alat yang Digunakan

Analisis alat yang digunakan, dalam artian kesesuaian kebutuhan dengan ketersediaan alat secara komprehensif, (seperti software, *hardware*, LAN, WAN, dan infrastruktur Teknologi Informatika).

Hal ini akan menjadi parameter bagi pengambil keputusan, mengenai spesifik kebutuhan alat yang harus diprioritaskan ketersediaannya.

c) Proses

Analisis proses dilakukan agar terjadi keselarasan pada tata kelola keamanan SPBE, dan Standart Prosedur Operasional kegiatan Pengamanan SPBE, sehingga keamanan SPBE memungkinkan untuk dimaksimalkan, agar SPBE yang transparan, komprehensif, aman dan akuntabel segera terwujud.

3) Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

Pelaksanaan sub kegiatan ini terdiri dari 1 indikator yaitu Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik, dengan target yang ingin dicapai adalah 1 Laporan.

Adapun pada sub kegiatan ini, melaksanakan pembinaan literasi keamanan dalam menerima/mengirim informasi melalui

media elektronik maupun non elektronik bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar dan Kabupaten/Kota se-Kalbar.

Pembinaan literasi keamanan SPBE ini mengacu pada beberapa instrumen yang direkomendasikan oleh Badan Sandi dan Siber Negara atau BSSN, sesuai aturan yang berlaku.

Selain itu dilaksanakan juga, sterilisasi tempat strategis sebagai bentuk pengamanan/pencegahan dugaan penyadapan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, agar keamanan informasi yang dimaksud terjamin valid, utuh dan kerahasiaannya

4) Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi

Pelaksanaan sub kegiatan ini terdiri dari 1 indikator yaitu Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi, dengan target yang ingin dicapai adalah 38 Perangkat Daerah.

a) Terbentuk dan beroperasinya Tim CSIRT.

Bidang Persandian dan Statistik Memiliki Tugas untuk Mengelola Insiden Keamanan Informasi di dalam wadah layanan SOC (*Security Operation Center*). Insiden Keamanan Informasi adalah setiap kejadian yang dapat menyebabkan gangguan pada sistem komputer, seperti serangan virus, akses illegal, kebocoran informasi, serangan DDOS, dan lain sebagainya. *CSIRT (Computer Security Incident Response Team)* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SOC atau *Security Operation Center*, yang telah dibentuk pada tahun 2020.

CISRT adalah sebuah Tim yang dibentuk untuk merespon insiden keamanan informasi yang terjadi pada konstituennya. Tujuan utama dari respon / tanggapan terhadap insiden adalah untuk meminimalisir insiden agar tidak menyebar serta agar sistem yang terinfeksi dapat

beroperasi secara normal. Latar belakang terbentuknya CISRT adalah banyaknya insiden (spam, malware, deface, phishing) terhadap aset TIK instansi pemerintah. Tujuannya untuk mengamankan dan meminimalisir insiden keamanan informasi di jajaran Perangkat Daerah Pemprov Kalimantan Barat.

- b) Terlaksananya Pembinaan dan Optimalisasi Penggunaan Layanan Persandian/ Sanapati Perangkat Daerah.
- c) Terlaksananya penyelenggaraan Dukungan Persandian Untuk Informasi Daerah.

Dalam rangka membangun kesamaan pemahaman terhadap penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi Daerah perlu untuk meningkatkan kesadaran pengamanan Informasi milik Pemerintah serta membangun kesamaan pemahaman tentang *Security awareness*. Meningkatkan layanan kebijakan Persandian dan keamanan Informasi, berupa inventarisasi data atau informasi yang dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Komitmen untuk melaksanakan tugas dan fungsi secara optimal dalam Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi dapat diidentifikasi bahwa tugas dan fungsi serta kewenangan persandian meliputi penyelenggaraan keamanan informasi rahasia pada transmisi (*informasi security*) dan penyelenggaraan intelijen sinyal (*signal intelligent*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

- d) Terselenggaranya Kerjasama dengan BSR E Dalam Penerbitan Tanda Tangan Digital di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Definisi Tanda Tangan Elektronik menurut UU ITE dan PP adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi

Elektronik lainnya sebagai alat verifikasi dan autentikasi atas id digital, keutuhan dan keaslian. Landasan Hukum TTE yang tertuang dalam UU ITE Pasal 11 yaitu Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah. UU ITE Pasal 12 menyebutkan bahwa setiap orang yang terlibat dalam Tanda Tangan Elektronik berkewajiban memberikan pengamanan atas Tanda Tangan Elektronik yang digunakannya.

b. Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi

1) *Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi*

Pelaksanaan sub kegiatan ini terdiri dari 1 indikator yaitu Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi, dengan target yang ingin dicapai adalah 38 Perangkat Daerah.

a) Penggunaan Layanan email dan Persandian/ Sanapati Perangkat Daerah dengan target 38 email sanapati OPD

Pelaksanaan persandian untuk pengamanan informasi dan terbentuknya Jaringan Komunikasi Sandi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat. Perlunya meningkatkan pengamanan informasi khususnya dalam sarana komunikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat, salah satunya dengan email Sanapati yang merupakan layanan email milik BSSN yang bersifat secure closed group (tertutup) yang memiliki proteksi terhadap fake email, spam email, dan email bombing.

b) Perangkat layanan jaringan komunikasi sandi pemerintah daerah yang tersedia dan beroperasi yaitu 1 Perangkat JKS Berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Gelar Jaring

Komunikasi Sandi, penyelenggaraan operasional Sistem Persandian Negara perlu dibangun Jaringan Komunikasi Sandi sebagai sarana utama yang digunakan dalam kegiatan komunikasi Persandian di lingkungan Instansi Pemerintah. Jaringan Komunikasi Sandi (JKS) memiliki keterhubungan antar Pengguna Persandian melalui jaringan telekomunikasi. Pengguna Persandian adalah pejabat pada Instansi Pemerintah yang memanfaatkan Persandian. Gelar Jaringan Komunikasi Sandi adalah kegiatan membangun JKS yang dimulai dari kegiatan perencanaan, implementasi dan evaluasi.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

A. INDIKATOR KINERJA

Adapun indikator kinerja untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan adalah sebagai berikut :

TABEL : 4.1
Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Program : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	persentase OPD dengan zona hijau / nilai 85 - 100	100%
	Persentase media komunikasi publik yang dikelola oleh OPD	100%
Kegiatan : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Pemerintah Kabupaten/ Kota dan OPD di Lingkungan Pemprov Kalbar yang membentuk PPID dan menyelenggarakan pelayanan informasi publik	100%
Sub Kegiatan : Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	1 Dokumen
Sub Kegiatan : Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen
Sub Kegiatan : Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen
Sub Kegiatan : Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1 Dokumen
Sub Kegiatan : Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	3 Layanan

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Sub Kegiatan : Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	250 orang
Sub Kegiatan : Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	1 Dokumen
Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	1 Dokumen
Program : Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase total bobot domain evaluasi SPBE	70%
Kegiatan : Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Subdomain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Subdomain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	100%
Kegiatan : Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase pengelolaan e-government diLingkup Pemerintah Daerah Provinsi	100%
Sub Kegiatan : Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	1 Dokumen
Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1 Unit
Sub Kegiatan : Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	1 Dokumen
Sub Kegiatan : Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 Dokumen

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROV. KALBAR

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Sub Kegiatan : Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	2 Unit
Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1 Dokumen
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	38 Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	10 Unit
Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik Yang Terhubung Dengan Sistem Peghubung Layanan Pemerintah Daerah	1 Layanan
Sub Kegiatan : Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City	1 Dokumen
Sub Kegiatan : Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen
Sub Kegiatan : Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government ChiefInformation Officer (GCIO)	1 Dokumen
Program : Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase data statistik sektoral OPD yang terintegrasi	100%
Kegiatan : Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam perencanaan dan evaluasi	100%
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1 Dokumen

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Sub Kegiatan : Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 Dokumen
Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	104 Orang
Program : Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Status Kesiapan Keamanan Informasi : - Baik - Cukup Baik -Pemenuhan Kerangka Kerja Dasar – Tidak Layak	Baik
Kegiatan : Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase pengelolaan keamanan informasi perangkat daerah	100%
Kegiatan : Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	Persentase OPD yang menggunakan layanan persandian	100%
Sub Kegiatan : Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Kebijakan TataKelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi SandiPemerintah Daerahyang Ditetapkan	1 Dokumen
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	1 Laporan
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan
Sub Kegiatan : Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	38 Perangkat Daerah

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Sub Kegiatan : Operasional Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	38 Perangkat Daerah

B. Kelompok Sasaran

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023 merumuskan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, Sasaran dan Lokasi sebagai berikut :

TABEL : 4.2
Kegiatan Program Prioritas Tahun 2023
Berdasarkan Sasaran dan Lokasi Kegiatan

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Sasaran	Lokasi
Program : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	persentase OPD dengan zona hijau / nilai 85 - 100		
	Persentase media komunikasi publik yang dikelola oleh OPD		
Kegiatan : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Pemerintah Kabupaten/ Kota dan OPD di Lingkungan Pemprov Kalbar yang membentuk PPID dan menyelenggarakan pelayanan informasi publik		
Sub Kegiatan : Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Masyarakat	Pontianak
Sub Kegiatan : Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Masyarakat	Pontianak
Sub Kegiatan : Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Masyarakat	Pontianak

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROV. KALBAR

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Sasaran	Lokasi
Sub Kegiatan : Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	OPD Pemprov Kalbar dan PPID Kab/Kota, Masyarakat, Badan Publik	Pontianak, Kalimantan Barat
Sub Kegiatan : Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	Masyarakat dan Media	Pontianak
Sub Kegiatan : Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	Masyarakat	Pontianak
Sub Kegiatan : Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Komisi Informasi Prov. Kalbar	Pontianak
Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Masyarakat	Pontianak
Program : Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase total bobot domain evaluasi SPBE		
Kegiatan : Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Subdomain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Subdomain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi		
Kegiatan : Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase pengelolaan e-government diLingkup Pemerintah Daerah Provinsi		
Sub Kegiatan : Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	OPD Pemprov Kalbar	Pontianak

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Sasaran	Lokasi
Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	OPD Pemprov Kalbar	Pontianak
Sub Kegiatan : Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	OPD Pemprov Kalbar	Pontianak
Sub Kegiatan : Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	OPD Pemprov Kalbar	Pontianak
Sub Kegiatan : Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	OPD Pemprov Kalbar	Pontianak
Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	OPD Pemprov Kalbar	Pontianak
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Masyarakat	Kabupaten / Kota
Sub Kegiatan : Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	OPD Pemprov Kalbar	Pontianak
Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik Yang Terhubung Dengan Sistem Peghubung Layanan Pemerintah Daerah	OPD Pemprov Kalbar	Pontianak

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Sasaran	Lokasi
Sub Kegiatan : Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City	OPD Pemprov Kalbar	Pontianak
Sub Kegiatan : Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	OPD Pemprov Kalbar	Pontianak
Sub Kegiatan : Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	OPD Pemprov Kalbar	Pontianak
Program : Penyelenggaraan Statistik Sektoral			
Kegiatan : Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi			
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	OPD Pemprov Kalbar	Pontianak
Sub Kegiatan : Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	OPD Pemprov Kalbar	Pontianak
Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	OPD Pemprov Kalbar	Pontianak

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Sasaran	Lokasi
Program : Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Status Kesiapan Keamanan Informasi : -Baik - Cukup Baik -Pemenuhan Kerangka Kerja Dasar – Tidak Layak		
Kegiatan : Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase pengelolaan keamanan informasi perangkat daerah		
Kegiatan : Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	Persentase OPD yang menggunakan layanan persandian		
Sub Kegiatan : Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan	Aparatur Pemerintah Prov. Kalbar	Pontianak
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Aparatur Pemerintah Prov. Kalbar	Pontianak
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Aparatur Pemerintah Prov. Kalbar	Pontianak
Sub Kegiatan : Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Aparatur Pemerintah Prov. Kalbar	Pontianak

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Sasaran	Lokasi
Sub Kegiatan : Operasional Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Aparatur Pemerintah Prov. Kalbar	Pontianak

C. KEBUTUHAN PENDANAAN INDIKATIF

Adapun kebutuhan pendanaan indikatif dalam rangka pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 28.842.388.335,00 (*Dua Puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah*) (rincian pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan terdapat pada lampiran).

D. SUMBER DANA

Sumber pendanaan yaitu melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023.

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan dalam periode 1 (satu) tahun yang memuat arah kebijakan pelaksanaan pembangunan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan dan juga sebagai penjabaran dari tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi acuan dan tolak ukur capaian kinerja Tahun 2023 dalam mewujudkan target-target kinerja yang telah ditetapkan dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah dan arah kebijakan pembangunan nasional. Dengan demikian, keberhasilan kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat akan menunjang keberhasilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam mewujudkan pelayanan publik yang akuntabel, transparan dan cepat melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Pelayanan Informasi dan Publikasi.

Dokumen Rencana Kerja Tahun 2023 masih jauh dari kata “sempurna” diharapkan berbagai kritik dan saran bagi perbaikan perencanaan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat guna mencapai peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan melalui keterbukaan informasi dan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik yang aman dan terintegrasi.

Pontianak, 27 Juli 2022

Plh. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Kalimantan Barat



D. ZAMRONI, S.STP, M.Si
Pembina

NIP. 19800307 199810 1 001

LAMPIRAN I

TABEL

PENETAPAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKPD) PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2023

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
										Nasional					Daerah				
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	16						28,141,065,235						0						
2	16	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Dokumen Perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang disusun tepat waktu Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai dengan SAP Persentase pelayanan administrasi kepegawai sesuai prosedur Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana tugas sesuai standar	persen persen persen persen	persen persen persen persen	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	11,601,501,945				100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	0			
2	16	01	1.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persen	persen	100 persen	400,324,200				100 persen	0			
2	16	01	1.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			8 Dokumen	150,000,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	8 Dokumen	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	1.01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1 Dokumen	19,111,800	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	1 Dokumen	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	1.01	03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1 Dokumen	20,412,400	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	1 Dokumen	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	1.01	04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			1 Dokumen	19,000,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	1 Dokumen	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	1.01	05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			1 Dokumen	20,000,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	1 Dokumen	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 16 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	44,000,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	3 Laporan	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	127,800,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	5 Laporan	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persen		persen	100 persen	8,068,286,905						100 persen	0	
2 16 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				55 orang/bulan	7,641,731,405	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	55 orang/bulan	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	5,000,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	1 Dokumen	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	281,760,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	1 Dokumen	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	71,000,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	1 Dokumen	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Dokumen	22,000,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	1 Dokumen	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 01 1.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	22,795,500	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	1 Dokumen	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.16.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan triwulan, laporan semester dan tahunan yang disusun				6 Laporan	24,000,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	6 Laporan	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	persen		persen	100 persen	59,154,700						100 persen	0	
2.16.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun				1 Dokumen	31,654,700	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	1 Dokumen	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	27,500,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	1 Laporan	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persen		persen	100 persen	278,874,625						100 persen	0	
2.16.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	72,404,625	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	1 Paket	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	103,000,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	1 Dokumen	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	17,000,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	1 Dokumen	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	23,000,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	1 Dokumen	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.16.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				54 Orang	39,490,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	54 Orang	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				54 Orang	23,980,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	54 Orang	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase pelayanan administrasi kepegawai sesuai prosedur	persen persen		persen persen	100 persen 100 persen	383,060,750						100 persen 100 persen	0	
2.16.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	28,998,750	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	1 Paket	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	44,224,600	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	1 Paket	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	10,753,600	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	1 Paket	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	63,960,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	1 Paket	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	19,999,800	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	1 Paket	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
										Nasional	Daerah									
2	16	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan digital				1 Dokumen	6,400,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	1 Dokumen	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2	16	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	19,824,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	1 Laporan	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2	16	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	173,900,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	1 Laporan	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2	16	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	15,000,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	1 Dokumen	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2	16	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persen		persen	100 persen	375,070,400							100 persen	0	
2	16	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	69,302,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	1 Paket	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2	16	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	288,768,400	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	1 Unit	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2	16	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	17,000,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	1 Unit	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2	16	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen		persen	100 persen	1,765,406,065							100 persen	0	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.16.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1,105,605	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	1 Laporan	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	223,000,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	1 Laporan	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	9,900,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	1 Laporan	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1,531,400,460	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	1 Laporan	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen		persen	100 persen	271,324,300						100 persen	0	
2.16.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	41,750,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	1 Unit	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	83,040,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	4 Unit	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				170 Unit	146,534,300	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	170 Unit	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase media komunikasi publik yang dikelola oleh OPD Persentase OPD dengan zona hijau / nilai 85 - 100	persen persen		persen persen	100 persen 100 persen	4,382,297,000						100 persen 100 persen	0	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 16 02 1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Pemerintah Kabupaten/ Kota dan OPD di Lingkungan Pemprov Kalbar yang membentuk PPID dan menyelenggarakan pelayanan informasi publik	persen		persen	100 persen	4,382,297,000						100 persen	0	
2 16 02 1.01 02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik				1 Dokumen	186,499,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	45 PPID OPD dan 14 PPID Kab/Kota, Masyarakat	1 Dokumen	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 02 1.01 04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik				1 Dokumen	1,250,000,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	45 PPID OPD dan 14 PPID Kab/Kota, Masyarakat	1 Dokumen	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 02 1.01 05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik				1 Dokumen	200,000,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	45 PPID OPD dan 14 PPID Kab/Kota, Masyarakat	1 Dokumen	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 02 1.01 06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik				1 Dokumen	1,361,798,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	45 PPID OPD dan 14 PPID Kab/Kota, Masyarakat	1 Dokumen	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 02 1.01 07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media				3 Layanan	174,082,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	45 PPID OPD dan 14 PPID Kab/Kota, Masyarakat	3 Layanan	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 02 1.01 10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya				250 Orang	119,918,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	45 PPID OPD dan 14 PPID Kab/Kota, Masyarakat	250 Orang	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 02 1.01 11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah				1 Dokumen	1,000,000,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	45 PPID OPD dan 14 PPID Kab/Kota, Masyarakat	1 Dokumen	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 16 02 1.01 12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan				1 Dokumen	90,000,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	45 PPID OPD dan 14 PPID Kab/Kota, Masyarakat	1 Dokumen	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase total bobot domain evaluasi SPBE	persen		persen	70 persen	12,157,266,290						70 persen	0	
2 16 03 1.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Subdomain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	persen		persen	100 persen	8,008,200,000						100 persen	0	
2 16 03 1.01 02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi				1 Dokumen	110,000,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Pemprov Kalbar	1 Dokumen	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 03 1.01 03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah				1 Unit	7,898,200,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Pemprov Kalbar	1 Unit	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 03 1.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	persen		persen	100 persen	4,149,066,290						100 persen	0	
2 16 03 1.02 01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi				1 Dokumen	70,000,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Pemprov Kalbar	1 Dokumen	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 03 1.02 02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik				1 Dokumen	45,000,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Pemprov Kalbar	1 Dokumen	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 03 1.02 03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola				2 Unit	1,929,001,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Pemprov Kalbar	2 Unit	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
										Nasional	Daerah									
2	16	03	1.02	04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah				1 Dokumen	118,265,290	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Pemprov Kalbar	1 Dokumen	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2	16	03	1.02	06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Data Sarana dan Prasarana Komunikasi dan Informatika pada wilayah 3T dan Kab/Kota se-Kalimantan Barat yang diinventarisir				14 Data Kabupaten	57,800,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Pemprov Kalbar	14 Data Kabupaten	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2	16	03	1.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan				10 Unit	950,000,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Pemprov Kalbar	10 Unit	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2	16	03	1.02	08	Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik Yang Terhubung Dengan Sistem Peghubung Layanan Pemerintah Daerah				1 Layanan	40,000,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Pemprov Kalbar	1 Layanan	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2	16	03	1.02	09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City				1 Dokumen	780,000,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Pemprov Kalbar	1 Dokumen	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2	16	03	1.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah				1 Dokumen	75,000,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Pemprov Kalbar	1 Dokumen	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2	16	03	1.02	11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)				1 Dokumen	84,000,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Pemprov Kalbar	1 Dokumen	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						404,360,200								0	
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL						404,360,200								0	
2	20	02	1.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi						404,360,200								0	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
2 20 02 1.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral				1 Dokumen	225,000,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		1 Dokumen	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2 20 02 1.01 03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun				1 Dokumen	93,000,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		1 Dokumen	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2 20 02 1.01 04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS				104 Orang	86,360,200	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		104 Orang	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2 21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						296,962,900							0		
2 21 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Status Kesiapan Keamanan Informasi : - Baik - Cukup Baik - Pemenuhan Kerangka Kerja Dasar - Tidak Layak	status		status	Baik status	296,962,900							Baik status	0	
2 21 02 1.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase pengelolaan keamanan informasi perangkat daerah	persen		persen	100 persen	200,038,700							100 persen	0	
2 21 02 1.01 01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan				1 Dokumen	26,770,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Aparatur Pemerintah Prov. Kalbar	1 Dokumen	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2 21 02 1.01 02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi				1 Laporan	64,561,700	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Aparatur Pemerintah Prov. Kalbar	1 Laporan	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2 21 02 1.01 03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				1 Laporan	7,275,400	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Aparatur Pemerintah Prov. Kalbar	1 Laporan	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 21 02 1.01 04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi				38 Perangkat Daerah	101,431,600	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Aparatur Pemerintah Prov. Kalbar	38 Perangkat Daerah	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 21 02 1.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	Persentase OPD yang menggunakan layanan persandian	persen		persen	100 persen	96,924,200						100 persen	0	
2 21 02 1.02 01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi				38 Perangkat Daerah	96,924,200	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Aparatur Pemerintah Prov. Kalbar	38 Perangkat Daerah	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TOTAL							28,842,388,335							0	

LAMPIRAN II

TABEL

**CASCADING DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROV. KALBAR**

CASCADING DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROV. KALBAR

Tujuan RPJMD	Indikator	SASARAN RPJMD					RENSTRA										PROGRAM			
		Sasaran RPJMD	Indikator	Target			TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	TARGET CAPAIAN						PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	
				2021	2022	2023					KONDISI AWAL	2019	2020	2021	2022	2023				KONDISI AKHIR
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan melalui keterbukaan informasi dan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik yang aman dan terintegrasi	predikat keterbukaan informasi publik	Informatif / Zona Hijau	Informatif / Zona Hijau	Informatif / Zona Hijau	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan melalui keterbukaan informasi dan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik yang aman dan terintegrasi	predikat keterbukaan informasi publik	Terselenggaranya pembinaan dan pengelolaan keterbukaan informasi publik Pemprov Kalbar	predikat dan nilai keterbukaan informasi publik	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif / Zona Hijau	Informatif / Zona Hijau	Informatif / Zona Hijau	Informatif / Zona Hijau	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.Terselenggaranya pembinaan dan pengelolaan keterbukaan informasi publik perangkat daerah	persentase OPD dengan zona hijau / nilai 85 - 100
																			2. Terselenggaranya pembinaan dan pengelolaan komunikasi publik perangkat daerah	Persentase media komunikasi publik yang dikelola oleh OPD
			predikat penilaian SPBE	Baik	baik	sangat baik			Terselenggaranya Tata Kelola SPBE Pemerintah Daerah yang Optimal	Nilai SPBE Pemerintah Daerah	2,60	2,60	2,60	2,60-3,50	2,60-3,50	3,50-4,20	3,50-4,20	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Terselenggaranya implementasi tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang optimal	persentase total bobot domain evaluasi SPBE
			integrasi data statistik sektoral	100%	100%	100%			Tercapainya Kriteria Tingkat Kematangan Indeks Pembangunan Statistik	Indeks Pembangunan Statistik Sektoral	1.600 (indikator Lama)	1.600 (indikator Lama)	2.800 (indikator Lama)	4.000 (indikator Lama)	7.000 (indikator Lama)	Terkelola	Terkelola	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Terselenggaranya pembinaan dan pengelolaan integrasi data statistik sektoral Pemerintah Daerah	Persentase data statistik sektoral OPD yang terintegrasi
			indeks keamanan informasi	Tingkat 3 / Cukup	Tingkat 4 / Baik	Tingkat 4 / Baik			Terselenggaranya Layanan Persandian untuk Keamanan Informasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas	Persentase Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Tidak Layak (Indikator Lama)	Tidak Layak (Indikator Lama)	Pemenuhan Kerangka Kerja Dasar (Indikator Lama)	Pemenuhan Kerangka Kerja Dasar (Indikator Lama)	100%	100%	100%	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAAN INFORMASI	Terselenggaranya persandian untuk pengamanan informasi	Status Keselapan Keamanan Informasi : - Baik - Pemenuhan Kerangka Kerja Dasar - Tidak Layak
									Terlaksananya Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Provinsi	1. Nilai dan Predikat SAKIP OPD	B (60 - 70)	B (60 - 70)	B (60 - 70)	B (60 - 70)	B (60 - 70)	BB (70 - 80)	BB (70 - 80)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Terselenggaranya urusan Komunikasi dan Informatika di lingkungan Pemrov. Kalbar	1. Persentase Dokumen Perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang disusun tepat waktu
										2. Nilai dan Predikat RB OPD	B (60 - 70)	B (60 - 70)	B (60 - 70)	B (60 - 70)	B (60 - 70)	BB (70 - 80)	BB (70 - 80)			2. Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai dengan SAP
																				3. Persentase pelayanan administrasi kepegawai sesuai prosedur
																				4. persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana tugas sesuai standar

CASCADING DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROV. KALBAR

PROGRAM										KEGIATAN							SUB KEGIATAN											
PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET							KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET							SUB KEGIATAN	Sasaran	Indikator (Setelah Perbaikan)	Indikator (Sebelum)	Target				
			Kondisi Awal	2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Akhir				Kondisi Awal	2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Akhir					2021	Rp.	2022	Rp.	2023
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1. Terselenggaranya pembinaan dan pengelolaan keterbukaan informasi publik perangkat daerah	persentase OPD dengan zona hijau / nilai 85 - 100	60%	60%	70%	80%	90%	100%	100%	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Terselenggaranya pelayanan informasi dan pembinaan PPIID Pembantu di lingkungan Pemprov Kalbar dan PPIID Kabupaten/ Kota	Persentase Pemerintah Kabupaten/ Kota dan OPD di Lingkungan Pemprov Kalbar yang membentuk PPIID dan menyelenggarakan pelayanan informasi publik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Perumusan Kebijakan Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah peraturan tingkat daerah di bidang informasi dan komunikasi publik yang terusun	/A	/A	/A	/A	1 Dokumen	/A
																		Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Terlaksananya Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Persentase informasi dan agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah	100%	Rp 224.629.277	/A	/A	1 Dokumen	/A	
																		Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	1) Jumlah anggota Komisiner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Kalimantan Barat yang dilantik periode 2022 - 2025 2) Jumlah Kegiatan Penerimaan dan Seleksi Calon Komisiner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Kalimantan Barat periode 2022 - 2025 3) Jumlah KPID yang mendapat Hibah 4) Jumlah PPIID Pembantu yang dinilai dalam implementasi Keterbukaan Informasi Publik 5) Jumlah PPIID Kabupaten/Kota yang dinilai dalam implementasi Keterbukaan Informasi Publik	1) 7 orang 2) 1 kegiatan 3) 1 Komisiner 4) 38 OPD 5) 14 Kab/Kota	Rp 1.202.740.679	Rp 1.323.014.747	1 Dokumen	Rp 100.000.000		
																		Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Terlaksananya Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah KI yang mendapat Hibah	1 Komisiner	Rp 1.000.000.000	1 Komisiner	Rp 1.000.000.000	1 Dokumen	Rp 1.500.000.000	
																		Penyediaan/ Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya Penyediaan/ Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah peralatan pendukung kegiatan di bidang informasi yang tersedia	/A	/A	/A	/A	1 Unit	Rp 100.000.000	
																		Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Terlaksananya Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	1) Jumlah opini dan aspirasi publik di media massa yang diinventarisir dan didokumentasikan 2) Jumlah Buletin yang tersedia dalam menyampaikan informasi publik	350 opini	Rp 148.285.315	400 opini	Rp 163.113.847	1 Dokumen	Rp 380.000.000	
																		Pelayanan Informasi Publik	Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1) Jumlah Badan Publik yang sudah menerapkan Keterbukaan Informasi Publik 2) Jumlah Infografis RLPPD yang dipublikasikan kepada masyarakat 3) Jumlah kegiatan Pembangunan Kalimantan Barat yang diupit, didokumentasikan dan dipublikasikan 4) Jumlah anggota Komisiner Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat yang dilantik periode 2022 - 2026 5) Jumlah Kegiatan Penerimaan dan Seleksi Calon Komisiner Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat periode 2022 - 2026 6) Jumlah KPID yang mendapat Hibah 7) Jumlah Website PPIID Utama yang dikelola	1) 14 PPIID Kab/Kota dan 38 PPIID OPD Prov. Kalbar 2) 1 infografis RLPPD 3) 220 Berita 4) 5 orang 5) 1 Kegiatan	Rp 76.563.096	Rp 462.525.600	1 Dokumen	Rp 2.108.778.160		

PROGRAM										KEGIATAN							SUB KEGIATAN													
PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET							KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET							SUB KEGIATAN	Sasaran	Indikator (Sesudah Perbaikan)	Indikator (Sebelum)	Target						
			Kondisi Awal	2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Akhir				Kondisi Awal	2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Akhir					2021	Rp.	2022	Rp.	2023	Rp.	
	2. Terselenggaranya pembinaan dan pengelolaan komunikasi publik perangkat daerah	Persentase media komunikasi publik yang dikelola oleh OPD	51,09%	51,09%	60,85%	80%	100%	100%	100%		Terselenggaranya Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) se Kalimantan Barat yang dibina	persentase Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) se Kalimantan Barat yang dibina	51%	51%	75%	51%	75%	100%	100%		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Komunitas	Terlaksananya Kerjasama dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Hubungan Masyarakat, Media dan Komunitas	Persentase Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Komunitas	100%	Rp. 270.766.085	100%	Rp. 297.842.694	1 Dokumen	Rp. 327.626.963
											Terselenggaranya Pengelolaan media komunikasi publik oleh OPD	Jumlah media komunikasi publik yang dikelola oleh OPD	5 Media	5 Media	5 Media	5 Media	5 Media	5 Media	5 Media		Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1) Jumlah Informasi Publik yang diposting melalui Media Sosial 2) Jumlah berita dan informasi yang diposting melalui Website http://kalbarprov.go.id 3) Jumlah Website Pemprov Kalbar yang di kelola	1) 2256 Postingan 2) 500 Postingan	Rp. 197.764.409	1) 2256 Postingan 2) 500 Postingan	Rp. 217.540.850	1 Dokumen	Rp. 339.294.935
																				Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Terlaksananya Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1) Jumlah Publikasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Pemerintah Provinsi Kalbar ke Masyarakat 2) Jumlah Video yang dibuat	1) 6 Publikasi	Rp. 130.209.861	1) 7 Publikasi	Rp. 143.230.847	1 Dokumen	Rp. 350.000.000	
																				Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	1) Jumlah SDM yang ditingkatkan Kapasitasnya di bidang Komunikasi Publik 2) Jumlah Rapat Badan Koordinasi Teknis Kehumasan 14 Kota se-Kalbar yang dilaksanakan dalam setahun	1) 52 Peserta 2) 2 Rakor	Rp. 43.351.291	1) 225 Peserta 2) 1 Rakor	Rp. 108.204.000	250 orang	Rp. 250.000.000	
																				Layanan Hubungan Media	Tersedianya Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	Jumlah Media yang terlayani - Media Elektronik - Media Cetak - Media Online	150 Peserta	Rp. 176.059.809	150 Peserta	Rp. 193.665.790	3 Layanan	Rp. 500.000.000	
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Terselenggaranya implementasi tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang optimal	persentase total bobot domain evaluasi SPBE	NA	NA	NA	60%	65%	70%	70%		Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Subdomain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Subdomain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Subdomain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	100%	100%	100%	100%	100%	100%		Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terlaksananya Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase domain dan subdomain terlayani	98%	Rp. 45.425.993	100%	Rp. 100.000.000	1 Dokumen	Rp. 110.000.000
																				Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintahan Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintahan Daerah	1) Jumlah OPD yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat 2) Jumlah akses internet OPD yang terlayani	1) 44 OPD 2) 11 OPD	Rp. 7.373.929.763	1) 34 OPD 2) 34 OPD	Rp. 7.902.140.000	1 unit	Rp. 8.692.354.000	
																				Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi	Terlaksananya Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi	Persentase Penyediaan Nama Domain Pemprov. Kalbar yang terfasilitasi	NA	NA	100%	Rp. 50.000.000	1 Domain	Rp. 60.000.000	

PROGRAM										KEGIATAN							SUB KEGIATAN													
PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET							KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET							SUB KEGIATAN	Sasaran	Indikator (Sesudah Perbaikan)	Indikator (Sebelum)	Target						
			Kondisi Awal	2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Akhir				Kondisi Awal	2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Akhir					2021	Rp.	2022	Rp.	2023	Rp.	
										Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terlaksananya Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Layanan Dasar SPBE	4 layanan : hosting, email, sub domain, datacloud	Rp. 55.006.650	4 layanan : Email, hosting, subdomain dan datacloud	Rp. 100.000.000	1 Dokumen	Rp. 110.000.000
										Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Terlaksananya Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik										Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Terlaksananya Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah peraluran pedoman latta kelola SPBE Pemprov Kalbar yang disusun	1 Pergub	Rp. 108.692.757	1 Pergub	Rp. 50.000.000	1 Dokumen	Rp. 55.000.000
										Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah										Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1) Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi dalam pengembangan dan pengelolaan sumber daya TIK Pemerintah Daerah 2) Jumlah Peserta yang mengikuti Workshop dalam pengembangan dan pengelolaan sumber daya TIK Pemerintah Daerah	1) 1 kali 2) 2 kali	Rp. 46.279.279	1) 50 Peserta 2) 50 Peserta	Rp. 74.464.900	1 Dokumen	Rp. 85.000.000
										Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Terlaksananya Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)										Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Terlaksananya Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah TIK OPD di lingkungan Pemprov Kalbar yang dikelola	47 OPD	Rp. 65.030.865	38 OPD	Rp. 84.672.100	1 Dokumen	Rp. 110.000.000
										Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Terkelolanya Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola										Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Terkelolanya Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Jumlah server yang dikelola di Pusat Data Pemprov Kalbar	19 unit server	Rp. 429.423.688	18 unit server	Rp. 479.280.400	2 Unit	Rp. 3.000.000.000
										Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Terlaksananya Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik										Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Terlaksananya Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	1) Jumlah Aplikasi yang dibangun / dikembangkan 2) Jumlah Video yang dibuat	1) 5 aplikasi	Rp. 332.934.013	1) 9 aplikasi 2) 2 video	Rp. 1.160.287.500	10 Unit	Rp. 1.150.000.000
										Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah										Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik Yang Terhubung Dengan Sistem Peghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah sistem penghubung layanan elektronik pemerintah yang dikelola	1 sistem penghubung	Rp. 50.408.051	1 sistem penghubung	Rp. 60.000.000	1 Layanan	Rp. 70.000.000
										Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas	Terlaksananya program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City										Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas	Terlaksananya program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City	Jumlah Dokumen program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City	1. Jumlah Ruang Data Centre yang di kelola 2. Jumlah portal aplikasi pelayanan publik yang dikelola	12 Laporan	Rp. 703.795.468	2 Ruang Data	Rp. 1.000.000.000	1 Dokumen	Rp. 1.300.000.000
										Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi										Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Persentase Sistem Informasi Yang Diamankan	100%	Rp. 600.000.000	100%	Rp. 600.000.000	1 Dokumen	Rp. 300.000.000

PROGRAM										KEGIATAN							SUB KEGIATAN												
PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET							KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET							SUB KEGIATAN	Sasaran	Indikator (Sesudah Perbaikan)	Indikator (Sebelum)	Target					
			Kondisi Awal	2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Akhir				Kondisi Awal	2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Akhir					2021	Rp.	2022	Rp.	2023	Rp.
																		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pengembangan Ekosistem SPBE	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	Jumlah Laporan Penilaian Indeks SPBE yang di susun	/A4	/A4	1 Laporan	Rp. 60.000.000	1 Dokumen	Rp. 70.000.000		
																	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Persentase Virtual Meeting Terlayak	/A4	A4	100%	Rp. 107.513.900	1 Dokumen	Rp. 118.265.290			
																	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Data Sarana dan Prasarana Komunikasi dan Informatika pada wilayah 3T dan Kab/Kota se-Kalimantan Barat yang diinventarisir	Data 5 kabupaten	Rp. 17.176.725	Data 5 kabupaten	Rp. 60.650.800	38 Perangkat Daerah	Rp. 110.000.000			
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Terselenggaranya pembinaan dan pengelolaan integrasi data statistik sektoral Pemerintah Daerah	Persentase data statistik sektoral OPD yang terintegrasi	70%	70%	80%	100%	100%	100%	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Terselenggaranya penggunaan data statistik dalam perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang optimal	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam perencanaan dan evaluasi	100%	100%	100%	100%	100%	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1) Jumlah Data Statistik Sektoral OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang dikumpulkan 2) Jumlah Analisis Data Statistik Sektoral OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang diolah dan di analisis 3) Jumlah Buku Kalimantan Barat Dalam Angka yang tersedia 4) Jumlah Buku Statistik Sektoral Kalimantan Barat yang tersedia 5) Jumlah Buku Daftar Data Prioritas	1) 47 data OPD 2) 47 data OPD 3) 70 buku KDA 4) 20 buku SS 5) 50 buku DDP	Rp. 225.872.305	1) 38 data OPD 2) 38 data OPD 3) 20 buku KDA 4) 0 buku SS 5) 0 buku DDP	Rp. 248.459.536	1 Dokumen	Rp. 350.000.000			
																	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Terbangunnya Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang di himpun	Jumlah Buku Standar Metadata Statistik Sektoral di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang tersusun	20 buku	Rp. 117.954.756	25 buku	Rp. 129.750.232	1 Dokumen	Rp. 142.725.255			
																	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	Jumlah Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	47 OPD	Rp. 71.372.168	1 Kali	Rp. 78.509.384	104 orang	Rp. 86.360.323			
																	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Terselenggaranya Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah data Statistik Sektoral yang Dihimpun	Jumlah OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar yang di digitalisasikan Peran dan Fungsi Wai Data Statistik Sektoral	47 OPD	Rp. 86.996.245	38 OPD	Rp. 95.695.870	1 Dokumen	Rp. 105.265.456			
																	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Meningkatnya Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM di Bidang Statistik yang diatih	/A4	A4	52 orang	Rp. 100.000.000	104 orang	Rp. 110.000.000			

PROGRAM										KEGIATAN							SUB KEGIATAN																
PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET							Kondisi Awal	Kondisi Akhir	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET							SUB KEGIATAN	Sasaran	Indikator (Sesudah Perbaikan)	Indikator (Sebelum)	Target							
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020						2021	2022	2023	2021	Rp.	2022	Rp.					2023	Rp.						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH PROVINSI	Terselenggaranya urusan Komunikasi dan Informatika di lingkungan Pemprov. Kalbar	1. Persentase Dokumen Perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusun dan Tersedia Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan yang disusun : 1. Analisis Resiko 2. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tingkat Kabupaten / Kota, Provinsi dan Nasional 3. Forum OPD 4. Perjanjian 5. RENJA 6. SIRUP	6 Dokumen dan 12 Laporan	Rp. 102.954.419	7 Dokumen dan 12 Laporan	Rp. 178.127.500	8 Dokumen	Rp. 195.940.250			
																						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedia Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun	1 Dokumen	Rp. 15.794.907	1 Dokumen	Rp. 17.374.398	1 Dokumen	Rp. 19.111.837		
																							Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedia Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA- SKPD yang disusun	NA	NA	1 Dokumen	Rp. 17.374.398	1 Dokumen	Rp. 19.111.837	
																							Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedia Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPASKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA- SKPD yang disusun	NA	NA	1 Dokumen	Rp. 30.000.000	1 Dokumen	Rp. 33.000.000	
																							Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedia Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA SKPD yang disusun	1 Dokumen	Rp. 14.831.392	1 Dokumen	Rp. 30.000.000	1 Dokumen	Rp. 33.000.000	
																								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedia Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja yang disusun : 1. LAKIP 2. LPPD 3. LKPJ	3 dokumen	Rp. 40.000.000	3 dokumen	Rp. 44.305.300	3 Laporan	Rp. 48.735.830
																								Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun : 1. Laporan Bulanan Realisasi Pengukuran Kinerja / e-kinerja 2. Simonev 3. RFK (Realisasi Fisik dan Keuangan) 4. e-SAKIP Reviu 5. TEPRRA	1 Dokumen dan 40 Laporan	Rp. 16.922.840	1 Dokumen dan 40 Laporan	Rp. 227.331.800	5 Laporan	Rp. 250.064.980
																								Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedia Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menemua Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayar Diskominfo Prov. Kalbar	55 ASN	Rp. 7.669.339.402	55 ASN	Rp. 7.855.658.405	55 orang/bulan	Rp. 8.641.224.246
																								Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedia Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100%	Rp. 5.200.000	100%	Rp. 5.720.000	1 Dokumen	Rp. 6.292.000

PROGRAM										KEGIATAN							SUB KEGIATAN													
PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET							KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET							SUB KEGIATAN	Sasaran	Indikator (Sesudah Perbaikan)	Indikator (Sebelum)	Target						
			Kondisi Awal	2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Akhir				Kondisi Awal	2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Akhir					2021	Rp.	2022	Rp.	2023	Rp.	
																		Pengadaan Aset Tak Berwujud	Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Jumlah Paket Pengadaan Aset Tak Berwujud	/A/	/A/	1 Paket	Rp	50.000.000	1 Unit	Rp	55.000.000	
																		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dibangun	/A/	/A/	Paket	Rp	100.000.000	1 Unit	Rp	110.000.000	
																		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Paket Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	/A/	/A/	1 Paket	Rp	100.000.000	1 Unit	Rp	110.000.000	
																		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Paket pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	1 paket	Rp	99.997.788	1 Paket	Rp	109.997.567	1 Unit	Rp	120.997.323
																		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase jasa surat menyurat yang tersedia	100%	Rp	1.991.925	100%	Rp	2.191.118	1 Laporan	Rp	2.410.229
																		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	Rp	216.500.000	100%	Rp	238.150.000	1 Laporan	Rp	261.965.000
																		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	100%	Rp	8.400.000	100%	Rp	9.240.000	1 Laporan	Rp	10.164.000
																		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1) Jumlah pegawai yang mendapat pembinaan Jasmani dan Rohani, 2) Jumlah Gedung Kantor yang mendapat jasa kebersihan 3) Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi yang disusun Pembantu di OPD 4) Jumlah PTT (Pegawai Tidak Tetap) Diskominfo Prov. Kalbar yang di pekerjaan	1) 54 ASN 2) 1 Gedung 3) 1 Dokumen Laporan	Rp	260.205.561	1) 95 pegawai 2) 1 Gedung 3) 1 Dokumen Laporan 4) 37 PTT	Rp	286.226.117	1 Laporan	Rp	314.848.729

PROGRAM										KEGIATAN										SUB KEGIATAN										
PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET							KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET							SUB KEGIATAN	Sasaran	Indikator (Sesudah Perbaikan)	Indikator (Sebelum)	Target						
			Kondisi Awal	2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Akhir				Kondisi Awal	2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Akhir					2021	Rp.	2022	Rp.	2023	Rp.	
										Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah kendaraan yang mendapat jasa pemeliharaan, dan pajak yang dibayarkan	1) 2 mobil dan 2 motor	Rp. 80.000.000	1) 2 mobil dan 2 motor	Rp. 80.000.000	1 Unit	Rp. 50.000.000
																					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1) Jumlah kendaraan dinas Roda 2 yang dibayar pajaknya 2) Jumlah kendaraan dinas Roda 4 dibayar pajaknya	5 mobil dan 5 motor	Rp. 85.840.000	1) 5 motor 2) 5 mobil	Rp. 94.424.000	4 Unit	Rp. 80.000.000
																					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Jumlah alat besar yang mendapat Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	/4	/4	/4	/4	NA	/4
																					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Jumlah alat angkutan darat yang mendapat Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	/4	/4	/4	/4	NA	/4
																					Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah mebel kantor yang mendapat biaya pemeliharaan	/4	/4	1 Tahun	Rp. 20.000.000	1 Unit	Rp. 22.000.000
																					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang mendapat biaya Pemeliharaan terdiri dari : AC (45 Unit), Komputer (83 Unit), Printer (43 Unit), Genset (1 unit)	170 unit	Rp. 112.105.200	170 unit	Rp. 123.315.720	170 unit	Rp. 155.000.000
																					Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Jumlah aset tetap yang mendapat pemeliharaan	/4	/4	1 Paket	Rp. 20.000.000	1 unit	Rp. 22.000.000
																					Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Jumlah Aset Tak Berwujud yang mendapat pemeliharaan	/4	/4	1 Paket	Rp. 20.000.000	1 Unit	Rp. 22.000.000

PROGRAM										KEGIATAN							SUB KEGIATAN											
PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET							KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET						SUB KEGIATAN	Sasaran	Indikator (Sesudah Perbaikan)	Indikator (Sebelum)	Target					
			Kondisi Awal	2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Akhir				Kondisi Awal	2019	2020	2021	2022	2023					Kondisi Akhir	2021	Rp.	2022	Rp.	2023
																		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah gedung yang mendapat biaya pemeliharaan	1 Gedung	Rp. 10.000.000	1 Gedung	Rp. 11.000.000	1 Unit	Rp. 1.850.000.000	
																		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang mendapat pemeliharaan	n/a	N/A	1 Sarpras	Rp. 80.000.000	1 Unit	Rp. 88.000.000	
																		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpelihara	N/A	N/A	1 Sarpras Pendukung	Rp. 80.000.000	1 Unit	Rp. 88.000.000	



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**